



Pemerintah
Kota Balikpapan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sekretariat Daerah



2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kota Balikpapan atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta dokumen perencanaan strategis yang berlaku, dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan kinerja yang berorientasi hasil.

LKjIP Tahun 2025 memuat informasi mengenai capaian sasaran strategis, realisasi indikator kinerja, analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, serta berbagai kendala dan langkah perbaikan yang akan dilaksanakan pada periode mendatang. Dengan penyusunan laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna

penyempurnaan pelaksanaan manajemen kinerja di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap LKjIP Tahun 2025 ini dapat menjadi instrumen evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Pj. Sekretaris Daerah

Kota Balikpapan



Agus Budi Prasetyo, S.I.P., M.T.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Balikpapan. Penyusunan laporan ini merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menekankan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara terstruktur dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah menunjukkan hasil yang baik dan konsisten. Sebagian besar indikator kinerja pada sasaran strategis telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian melampaui target. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta konsistensi dalam pengendalian dan monitoring kinerja.

Pada aspek akuntabilitas, nilai SAKIP Sekretariat Daerah tetap terjaga pada kategori yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa sistem manajemen kinerja telah berjalan secara sistematis. Pada aspek tata kelola pemerintahan dan pembangunan, indikator-indikator utama seperti skor LPPD, persentase kebijakan dan kerja sama yang ditindaklanjuti, Indeks Tata Kelola Pengadaan, serta rata-rata capaian realisasi fisik pembangunan daerah menunjukkan hasil yang terkendali dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai 85,18% dari total pagu anggaran. Secara umum, pemanfaatan anggaran telah mendukung pencapaian target kinerja secara efektif dan relatif efisien. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, yaitu Indeks Reformasi Hukum dan Nilai AKIP Komponen Pelaporan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan standar dan variabel penilaian, belum optimalnya pemanfaatan laporan kinerja dalam siklus perencanaan, serta perlunya penguatan integrasi antara proses evaluasi dan penetapan target kinerja berbasis data historis dan analisis tren capaian.

Sebagai tindak lanjut, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan akan melakukan penguatan integrasi siklus manajemen kinerja, peningkatan kualitas perencanaan berbasis data, optimalisasi pemanfaatan laporan kinerja sebagai instrumen pengendalian, serta penguatan pelaksanaan reformasi hukum dan peningkatan kualitas pelaporan kinerja. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran strategis.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam penerapan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Ke depan, penguatan manajemen kinerja yang berorientasi hasil dan berbasis bukti akan terus menjadi prioritas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang semakin transparan, responsif, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	7
1.6. Sistematik Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perencanaan Strategis	11
2.2. Indikator Kinerja Utama	44
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	71

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	71
3.2. Capaian Kinerja Organisasi.....	75
3.2.1.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	76
3.2.2.Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	87
3.2.3.Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	94
3.2.4.Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	100
3.2.5.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	109
3.2.6.Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	137
3.2.7.Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	156
3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	169
BAB IV PENUTUP	176
4.1 Kesimpulan	176

4.2 Rencana Tindak Lanjut	177
---------------------------------	-----

Lampiran

DAFTAR TABEL

Table 1 : Daftar Aparatur Sipil Negara	7
Table 2 : Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026	14
Table 3 : Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.....	17
Table 4 : Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	30
Table 5 : Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.....	46
Table 6 : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029.....	49
Table 7 : Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025	54
Table 8 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	54
Table 9 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025.....	56
Table 10 : Tabel Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025	58
Table 11 : Tabel Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025.....	72
Table 12 : Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025	73
Table 13 : Predikat Capaian Kinerja.....	76
Table 14 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	78
Table 15 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029	83
Table 16 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	87

Table 17 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir....	91
Table 18 : Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026	96
Table 19 : Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029	97
Table 20 : Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	101
Table 21 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	106
Table 22 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	111
Table 23 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	124
Table 24 : Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra.....	139
Table 25 : Analisis Capaian Kinerja	149

Table 26 : Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	157
Table 27 : Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Menurut Tingkat Pendidikan.....	158
Table 28 : Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.....	160
Table 29 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	163
Table 30 : Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025.....	169

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Sekretariat Daerah.....	6
Gambar 2 : Visi Walikota Balikpapan 2021-2026	12
Gambar 3 : Misi Walikota Balikpapan 2021-2026.....	13
Gambar 4 : Visi Walikota Balikpapan Tahun 2025-2029	15
Gambar 5 : Evaluasi Akip 2025	79
Gambar 6 : SK Mendagri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	80
Gambar 7 : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Balikpapan Bulan Desember Tahun 2025	81
Gambar 8 : Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementrian/Lembaga Pemerintah Daerah Tahun 2025.....	82
Gambar 9 : Indeks RB Pemkot Balikpapan Tahun 2024	84
Gambar 10 : Monitoring Indikator Kinerja Presentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	85
Gambar 11 : Capaian IRH Tahun 2023-2025	85
Gambar 12 : Monitoring Indikator Kinerja Kebijakan Perekonomian yang Difasilitasi	86
Gambar 13 : Laporan Aplikasi Siperangko Tahun 2025.....	86
Gambar 14 : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah	117
Gambar 15 : Rapat Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan.....	118
Gambar 16 : Desk Perangkat Daerah.....	118
Gambar 17: Fasilitasi Kerjasama	119
Gambar 18 : Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Bidang Stunting	120
Gambar 19 : High Level Meeting TPID Inflasi Daerah Kota Balikpapan	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam penggunaan sumber daya yang tersedia.

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan memiliki peran strategis sebagai unsur staf yang membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan serta pengoordinasian administratif pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah dituntut untuk mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan melalui kinerja yang efektif, efisien, dan terukur.

LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan, antara lain Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dan Rencana Kinerja Tahunan.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota Balikpapan dan Masyarakat, LKjIP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Melalui laporan ini, diharapkan dapat diketahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, permasalahan yang dihadapi, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan guna meningkatkan kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja instansi, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Balikpapan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai pengaturan mengenai struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan; dan
9. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman dalam penataan organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas

pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2025.

Adapun tujuan LKjIP Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyajikan informasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan secara terukur dan akuntabel berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan;
2. Menilai tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025;
3. Mengidentifikasi permasalahan, hambatan, serta faktor pendukung dalam pelaksanaan kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang; dan
4. Menjadi bahan masukan bagi pimpinan dalam pengambilan Keputusan dan perumusan kebijakan guna meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

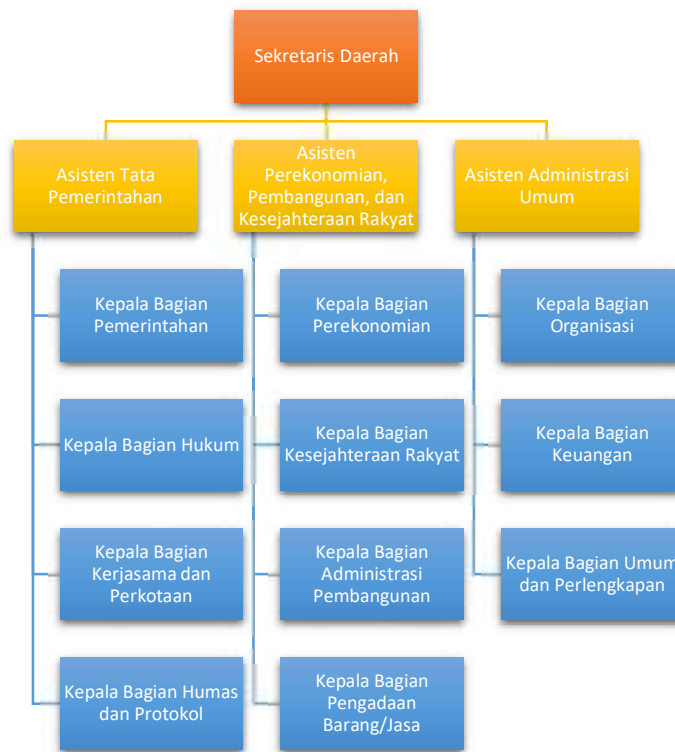
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Wali Kota Balikpapan. Sekretariat Daerah memiliki peran strategis dalam membantu Wali Kota dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta pelayanan administrative pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Sekretariat Daerah mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, serta melaksanakan pelayanan administrative yang meliputi bidang pemerintahan, perekonomian dan Pembangunan, serta administrasi umum.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Asisten Administrasi Umum, yang membawahi beberapa bagian sesuai dengan bidang tugas masing – masing. Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan terwujudnya koordinasi yang efektif, sinkronisasi kebijakan, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 : Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Sumber : Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan data Simpeg Tahun 2025 sebanyak 193 orang.

Table 1 : Daftar Aparatur Sipil Negara

No.	Pimpinan/ Bagian	Pria	Wanita	Gol II	Gol III	Gol IV	PPPK	PPPK Paruh Waktu	SMA	D 3	S 1	S 2
1	Sekretaris Daerah	1				1						1
2	Asisten	2	1			3						3
3	Staf Ahli	2	1			3						3
4	Bagian Keuangan	4	8		7	1	4		8	1	3	
5	Bagian Umum dan Perengkapan	42	12	13	16	1	18	6	43	7	3	1
6	Bagian Organisasi	1	8		6	2	1		1		7	1
7	Bagian Humas dan Protokol	12	9		11		10		6	2	12	1
8	Bagian Pemerintahan	5	7	1	8	1	2		2	1	9	
9	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	7		6	1	3	2	3		7	2
10	Bagian Hukum	8	8		7	3	6				12	4
11	Bagian Kerjasama dan Perkotaan	3	4	1	4	1	1			1	4	2
12	Bagian Perekonomian	3	6		4	2	3				7	2
13	Bagian Administrasi Pembangunan	3	6		5	1	3			1	5	2
14	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	13	13		21	2	3		3		21	2
Jumlah ASN		104	89	14	95	22	54	8	66	13	90	24
Jumlah		193 pegawai										

Sumber : Simpeg Sekretariat Daerah Tahun 2025

1.5. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung Wali Kota melalui fungsi koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan antar Perangkat Daerah. Sebagai unsur staf, Sekretariat Daerah berperan penting dalam memastikan kebijakan daerah dapat dirumuskan secara terpadu dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh Perangkat Daerah.

Peran strategis tersebut menempatkan Sekretariat Daerah sebagai penghubung antar kebijakan pimpinan daerah dengan pelaksanaan teknis oleh Perangkat Daerah, sehingga kualitas koordinasi dan fasilitasi yang dilakukan sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran Pembangunan daerah.

Meskipun telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2025 masih menghadapi beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi efektivitas peran strategisnya, antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan administratif yang berkualitas pada Sekretariat Daerah untuk mendukung efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Perubahan dan dinamika regulasi yang cepat menuntut penyesuaian kebijakan daerah secara responsif dan konsisten; dan
3. Keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung fungsi fasilitasi, pengendalian, dan evaluasi kinerja.
4. Belum Optimalnya Peran unit kerja Sekretariat Daerah dalam menjalankan Fungsi Koordinasi, Fasilitasi serta Kolaborasi atas Penyusunan, Pemantauan, serta Evaluasi Kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut menjadi fokus perhatian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam merumuskan strategi dan kebijakan guna meningkatkan efektifitas

koordinasi, penguatan tata Kelola pemerintahan, serta akuntabilitas kinerja daerah.

1.6. Sistematik Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun untuk memberikan Gambaran serta memudahkan pemahaman terhadap substansi laporan. Adapun sistematika penulisan LKjIP ini Adalah sebagai berikut :

Bagian Awal

Bagian awal laporan memuat Kata Pengantar, Ringkasan Eksekutif, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Lampiran, yang berfungsi memberikan Gambaran umum mengenai isi laporan serta memudahkan pembaca dalam menelusuri informasi yang disajikan.

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan LKjIP, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, Gambaran umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, serta aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun 2025.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menyajikan perencanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang meliputi visi dan misi daerah yang menjadi acuan, tujuan dan sasaran strategis, indicator kinerja, serta berkaitan antara perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan selama Tahun 2025, analisis pencapaian sasaran strategis, perbandingan antara target dan realisasi kinerja, serta faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi simpulan umum atas pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 serta langkah – langkah perbaikan dan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Lampiran

Berisi matriks renstra Sekretariat Daerah, Rencana Kinerja, dan lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan.

Dalam hal ini tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan mengacu pada dua dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029, yang masing – masing disusun sebagai penjabaran teknis dari visi misi Kepala Daerah pada periode perencanaan yang bersangkutan.

Penggunaan dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan, dengan tetap berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah.

Pada subbab ini disajikan tujuan, sasaran, indicator kinerja, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan yang mendukung pencapaian visi

dan misi Kepala Daerah pada Tahun 2025, sesuai dengan dokumen Renstra yang menjadi acuannya.

Perencanaan strategis tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target kinerja yang berbeda antarperiode Renstra, serta tetap menjaga keterkaitan dan kesinambungan kinerja perangkat daerah.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi Kota Balikpapan yang dituangkan dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:

Gambar 2 : Visi Walikota Balikpapan 2021-2026



Mengacu pada visi Kota Balikpapan, maka pemerintah Kota Balikpapan merumuskan misi yang dapat menggambarkan hal – hal yang harus terlaksana dalam

mencapai visi tersebut dan berkaitan dengan Sekretariat Daerah, yaitu :



Gambar 3 : Misi Walikota Balikpapan 2021-2026

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 disajikan pada table di bawah ini :

Table 2 : Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					KONDISI AKHIR 2026
					2022	2023	2024	2025	2026	
					6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5						11
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	10,88	11,86	11,86	11,87	11,87	11,87	11,87
		1	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	N/A	95,53%	98,03%	98,25%	98,47%	98,69%	98,69%
		2	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah	31,79	31,89	32,00	32,10	32,20	32,30	32,30

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi Wali Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah



Gambar 4 : Visi Walikota Balikpapan Tahun 2025-2029

Berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai salah satu perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sangat terkait erat dengan pencapaian misi ke- 1 yaitu “Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan professional

yang berorientasi pada pelayanan masyarakat”. Berdasarkan visi dan misi Kota Balikpapan tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 disajikan pada table di bawah ini :

Table 3 : Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KETERANGAN	
							2025	2026	2027	2028	2029		2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH													
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Nilai Reformasi Birokrasi General (Nilai)	Ukuran yang menunjukkan tingkat capaian perbaikan tata kelola pemerintahan secara sistematis dan lintas sektor melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan birokrasi,	Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	69,96	69,98	70,18	70,28	70,38	70,48	70,58	Sumber Data : Bagian Organisasi

[illegible]

										Sumber Data : Bagian Organisasi i
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik (Nilai)	Ukuran yang menunjukkan tingkat capaian perbaikan tata kelola pemerintahan yang difokuskan pada penyelesaian permasalahan hilir secara lintas sektor untuk mendukung percepatan agenda prioritas pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan untuk mengurai dan	Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendaayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	8,32	8,32	8,34	8,36	8,38	8,4	8,42	

[illegible]

		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat melalui kebijakan yang adaptif dan sinergi	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Poin)	Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 tahun anggaran	Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (dihitung oleh kementerian dalam negeri)	3,25	3,70 18	3,7 03	3,7 04	3,7 05	3,7 06	3,7 07	Sumber Data : Bagian Pemerintahan
--	--	--	---	---	---	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------------

		Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	Ukuran yang menunjukkan mana efektifitas dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti	(Jumlah perjanjian kerjasama / jumlah sama yang disepakati (MoU) X100%	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91,2	Sumber Data : Bagian kerjasama dan perkotaan
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan (%)	Ukuran yang menunjukkan mana efektifitas rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	(Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan / jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi) x 100 %	90	90,2	90,4	90,6	90,8	91	91,2	Sumber Data : Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	Ukuran efektifitas dan capaian pelaksanaan reformasi hukum oleh instansi pemerintah	Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (dihitung oleh kementerian)	98,32	98,35	98,4	98,45	98,5	98,55	98,6	Sumber Data : Bagian Hukum

	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti (%)	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana efektivitas rumusan kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	(Jumlah kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti / jumlah kebijakan perekonomian daerah yang difasilitasi) x 100%	100	100	100	100	100	100	Sumber Data : Bagian Perekonomian	
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (Poin)	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kematangan kepatuhan dan efektivitas sistem pengelolaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan	Nilai yang dikeluarkan oleh lembaga kebijakan pengadaan pemerintah (dihitung oleh LKPP)	73,7	74	74,1	74,2	74,3	74,4	74,5	Sumber Data : Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Kota Balikpapan Komponen Pelaporan (Poin)	Ukuran capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat informasi hasil pengukuran kinerja secara lengkap, tepat waktu, akurat, konsisten, serta sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Penilaian meliputi kelengkapan isi	Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	9,48	9,72	9,82	9,89	9,96	10,03	10,1	Sumber Data : Bagian Organisasi
--	--	---	--	--	--	------	------	------	------	------	-------	------	---------------------------------

	laporan, kesesuaian dengan perencana an, kejelasan analisis capaian kinerja, penggunaan indikator yang terukur, penyajian data pendukung yang valid, dan pemanfaat annya untuk perbaikan kinerja.
--	---

Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	Angka yang menunjuk kan tingkat keberhasil an suatu perangkat daerah dalam melaksana kan tugas dan tanggung jawab, yang diukur melalui evaluasi sistem Akuntabilit as Kinerja Instansi Pemerinta h (SAKIP). Nilai ini mencermin kan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencana kan, melaksana	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, yang diukur melalui evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	76,33	77,0 3	77, 5	77, 8	78	78, 3	78, 8	Sumber Data : Bagian Keuangan
--	--	--	-------	-----------	----------	----------	----	----------	----------	--

Sumber : Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing – masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajikan pada table berikut :

Table 4 : Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021 - 2026						Renstra Tahun 2025 - 2029						N o		N o		N o		Sub Kegiatan	
N o	Tujuan	N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Tar get Tahun 2025	N o	Tujuan	N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get Tahun 2025	N o	Program	N o	Kegiatan	N o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	1		Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	11,87	1	Meningkatnya dukung tata kelola pemerintahan yang berkualitas			Nilai Reformasi Birokrasi General (Nilai)	69,98								
										Nilai Reformasi Birokrasi Tematik (Nilai)	8,32								
		1	Meningkatnya Kualitas Penerimaan	Nilai Reformasi Birokrasi Sekretaris	32,20			1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Komponen Pelaporan (Poin)	9,72	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

[illegible]

[illegible]

																				30	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
																				31	Pemeliharaan Aser Tak Berwujud
																				32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
																				33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
																				34	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
																				8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
																				35	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan

													Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
													36 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
													37 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
													38 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
													39 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
													40 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
													41 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan disusun sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 900/0157/Keu Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Tentang Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026. IKU tersebut berfungsi sebagai instrument pengukuran kinerja yang digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Indikator kinerja utama Tahun 2021 – 2026 ditetapkan untuk menggambarkan peran Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, IKU yang ditetapkan tidak hanya berorientasi pada output kegiatan, tetapi juga diarahkan untuk mengukur kualitas kinerja pelayanan administrative, efektivitas koordinasi perangkat daerah, serta mendukung pencapaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan secara keseluruhan.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, di mana Pemerintah Kota Balikpapan mulai mengimplementasikan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Dalam konteks tersebut, indikator kinerja utama yang digunakan pada tahun 2025 tetap mengacu pada IKU Tahun 2021 – 2026, dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan keselarasan terhadap

arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Renstra Tahun 2025 – 2029.

Dengan demikian, IKU Tahun 2021 – 2026 yang disajikan dalam LKjIP ini menjadi dasar pengukuran kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025, sekaligus sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pada masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Daftar indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 disajikan pada table berikut :

Tabel 5 : Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Bagian Keuangan
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Hasil Evaluasi Kementerian Dalam Negeri	Laporan Hasil Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan
		Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	(Jumlah Kerjasama yang ditindaklanjuti/jumlah seluruh kerjasama)x100%	MoU/Perjanjian Kerjasama	Bagian Kerjasama dan Perkotaan
		Persentase produk hukum yang di fasilitasi dan di harmonisasi	(Jumlah produk hukum disahkan/total produk hukum yang akan dibuat)x100%	Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Tingkat Inflasi Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	Bagian Perekonomian
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Hasil Evaluasi oleh LKPP	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)	Bagian PBJ
		Persentase rata - rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Hasil Rata-rata capaian realisasi fisik yang dilaporkan pada SIPERANGKO	Output Aplikasi Siperangko	Bagian Administrasi Pembangunan

Sumber : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 900/0157/Keu

Seiring dengan berakhirnya periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan dimulainya periode perencanaan pembangunan daerah yang baru, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk periode Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengukuran kinerja organisasi. IKU tersebut ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan dan berfungsi sebagai instrument utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 dirumuskan untuk menggambarkan peran Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang memiliki fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pengendalian kebijakan daerah. Penetapan IKU tersebut mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, penajaman peran organisasi, serta tuntutan peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan dan pelayanan administrasi pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan karakteristik tahun 2025 sebagai masa transisi, penerapan IKU Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan secara bertahap dan terukur, sehingga pelaksanaan pengukuran kinerja tetap berjalan secara konsisten dan akuntabel. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan

dalam Keputusan Sekretaris Daerah nomor 900/013/Keu,
disajikan pada table berikut :

Tabel 6 : Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN DAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1	Meningkatnya dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	Ukuran yang menunjukkan tingkat capaian perbaikan tata kelola pemerintahan secara sistemik dan lintas sektor melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan umum birokrasi, seperti tumpang tindih regulasi dan kewenangan, lemahnya koordinasi, serta mendorong konsistensi kebijakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.	Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi

	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Ukuran yang menunjukkan tingkat pencapaian perbaikan tata kelola pemerintahan yang difokuskan pada penyelesaian permasalahan hilir secara lintas sektor untuk mendukung percepatan agenda prioritas pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan untuk mengurai dan mengatasi akar persoalan tata kelola (debottlenecking) sesuai tema yang telah ditetapkan pada tingkat makro	Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Bagian Organisasi
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.	Nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Dihitung oleh Kementerian Dalam Negeri)	Bagian Pemerintahan
		Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana efektifitas dokumen kerja sama yang ditindaklanjuti	MoU / Perjanjian Kerjasama	Bagian Kerjasama dan Perkotaan

	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	Ukuran yang menunjukkan sejauh mana efektifitas rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	(Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan / Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi) x 100%	Jumlah kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan dan difasilitasi	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Indeks Reformasi Hukum	Ukuran efektifitas dan capaian pelaksanaan reformasi hukum oleh instansi pemerintah	Nilai Yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum (Dihitung oleh Kemenhuk)	Produk Hukum Daerah	Bagian Hukum
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Rasio antara jumlah kebijakan di bidang perekonomian yang mendapat fasilitas (dukungan, asistensi, atau pendampingan) terhadap total dokumen permasalahan/ usulan kebijakan yang diakomodir oleh Bagian Perekonomian	(Jumlah rumusan kebijakan bidang Perekonomian yang difasilitasi/ Jumlah dokumen permasalahan atau usulan kebijakan bagian perekonomian) X 100%	Badan Pusat Statistik	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kemandirian kepatuhan dan efektifitas sistem pengelolaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah	Nilai yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (Dihitung oleh LKPP)	Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Persentase Rata-Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	Tingkat kemampuan Perangkat Daerah dalam menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan	Hasil Realisasi Fisik SIPERANGKO (Nilai total capaian realisasi fisik per perangkat daerah / jumlah perangkat daerah)	Output Aplikasi Siperangko	Bagian Administrasi Pembangunan

4	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	Ukuran capaian kinerja pemerintah daerah dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat informasi hasil pengukuran kinerja secara lengkap, tepat waktu, akurat, konsisten, serta sesuai format dan ketentuan yang berlaku. Penilaian meliputi kelengkapan isi laporan, kesesuaian dengan perencanaan, kejelasan analisis capaian kinerja, penggunaan indikator yang terukur, penyajian data pendukung yang valid, dan pemanfaatannya untuk perbaikan kinerja.	Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Kemenpan RB	Bagian Organisasi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Nilai yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan atas hasil Evaluasi Implementasi SAKIP internal Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sumber : Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor : 900/013 /Kev

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Sekretaris Daerah selaku pimpinan perangkat daerah dengan Wali Kota Balikpapan yang memuat komitmen kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja disusun sebagai bentuk implementasi manajemen kinerja serta menjadi dasar dalam pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan kinerja yang berlaku serta memperhatikan kebijakan pembangunan daerah. Mengingat Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, Perjanjian Kinerja disusun dan disesuaikan secara bertahap untuk menjaga kesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Perjanjian Kinerja murni Tahun 2025 menggambarkan komitmen awal kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagaimana ditetapkan pada awal tahun anggaran. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, serta alokasi anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah pada Tahun 2025. Perjanjian Kinerja murni tersebut disajikan pada table berikut :

Tabel 7 : Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	79,50
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD Kota Balikpapan	Poin	3.25
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	90%
		Presentase produk hukum yang di Fasilitasi dan di harmonisasi	Persen	100%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	2,5±1%
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	74
		Presentase rata rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	97%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

Selanjutnya, dalam rangka menyesuaikan dinamika kebijakan, hasil evaluasi internal, serta perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut bertujuan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan kinerja dengan kondisi actual pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disajikan pada table berikut :

Table 8 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	76.33	77
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD	Poin	3,7018	3,7018
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	90	90,2
		Presentase Produk Hukum yang di Fasilitasi dan di Harmonisasi	Persen	100	100
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	1,11	2,5±1
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	73,70	74
		Presentase rata - rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	96,49	96,5

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Seiring dengan ditetapkanya Indikator Kinerja Utama dan arah perencanaan kinerja untuk periode tahun 2025 – 2029, Perjanjian Kinerja juga disusun dengan memperhatikan kesinambungan perencanaan jangka menengah. Penyesuaian Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa komitmen kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2025 tetap selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah periode selanjutnya. Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025 – 2029 disajikan pada table berikut :

Tabel 9 : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	69.96	69.98
		Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	8.32	8.32
1.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,7018	3,7018
		Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	90	90,2
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	%	90	90,2
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98,32	98,35
1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	73,7	74,0
		Persentase Rata-Rata capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	%	96,49	96,50
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	Nilai	9,48	9,72

		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,33	77
--	--	-----------------------------	-------	-------	----

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra 2025-2029

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp 201.560.118.204. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp 198.057.474.108, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien. Adapun pendanaan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan disajikan sebagaimana table di bawah ini :

Tabel 10 : Rencana Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025				Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET	No	Tujuan /Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	
				1	Meningkatnya a dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	69.98			
						Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	8.32			
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	77	1.1	Meningkatnya a Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	9,72	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp 143,299,091,863	
						Nilai AKIP Perangkat Daerah	77	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 222,045,430	
								Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 33,999,650	
								Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 88,045,955	

									Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Rp 19,999,825
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 80,000,000
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 35,165,745,395
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 34,904,996,000
									Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 196,841,370
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 17,181,295
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Rp 46,726,730

										Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Rp 677,797,325
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 450,000,000
										Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 18,423,246,623
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 7,136,250,000
										Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 4,066,981,729
										Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 610,575,546
										Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 750,000,000
										Pengadaan Mebel	Rp 500,000,000

									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 924,257,183
									Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 1,282,149,000
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 31,211,516,010
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 3,400,000,000
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 27,811,516,010
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 13,553,997,066

									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 1,506,500,000
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 4,500,349,800
									Pemeliharaan Mebel	Rp 160,000,000
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1,368,672,000
									Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp 25,000,000
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 5,122,766,266

									Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 870,709,000
									Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2,620,084,003
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 250,000,000
									Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 300,000,000
									Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp 2,070,084,003

										Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Rp 1,700,000,000
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Rp 800,000,000
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Rp 750,000,000
										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Rp 150,000,000
										Penataan Organisasi	Rp 841,102,822
										Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Rp 215,549,917
										Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 178,845,805
										Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp 87,677,881

									Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Rp 200,379,625
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp 158,649,594
									Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Rp 2,998,991,390
									Fasilitasi Keprotokolan	Rp 1,028,400,000
									Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Rp 1,052,886,015
									Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Rp 917,705,375
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD	3,7018	1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan	Skor Lapangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,7018	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		Rp 50,458,243,982
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	90,2 %			Persentase Kerja Sama Daerah yang	90,2 %	Administrasi Tata Pemerintahan		Rp 16,680,259,580

										Fasilitasi Bantuan Hukum	Rp 904,499,420
										Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Rp 1,291,147,900
										Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Rp 18,850,867,379
										Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Rp 16,365,351,854
										Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Rp 2,303,883,225
										Pelaksanaan, kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Rp 181,632,300

3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	2,5±1	1. 3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100%	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 4,300,138,263
			74		Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	74,0		
			96,5 %		Pembangunan	Persentase Rata-Rata capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	96,50 %		
									Rp 417,000,000
								Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp 407,000,000
								Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Rp 188,510,715
								Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp 1,158,512,382
								Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Rp 271,271,945

									Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Rp 195,969,111.50
									Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Rp 691,271,325.50
									Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 2,129,115,166
									Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 340,369,700
									Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Rp 717,452,311
									Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 1,071,293,155

Sumber : Dokumen DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan memperoleh nilai sebesar 77,05. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan nilai evaluasi pada tahun sebelumnya.

Peningkatan nilai tersebut mencerminkan adanya perbaikan dalam penerapan prinsip – prinsip akuntabilitas kinerja, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja. Hal ini menunjukkan komitmen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam memperkuat system pengelolaan kinerja yang berorientasi pada hasil serta peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan.

Rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berdasarkan komponen penilaian SAKIP dapat dilihat pada table berikut :

Table 11 : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	24.09
2	Pengukuran Kinerja	30	23.44
3	Pelaporan Kinerja	15	10.43
4	Evaluasi Kinerja	25	19.09
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77.05
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025

Selanjutnya, sebagai bentuk tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah menyusun dan melaksanakan berbagai Upaya perbaikan yang dituangkan dalam matriks tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah table dilihat pada table berikut :

Tabel 12 : Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

No	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja yang telah diperbaiki agar diformalkan dalam Dokumen Renstra	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Telah diperbaharui dan telah diformalkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029
2	Pengukuran Kinerja	Melaksanakan penerapan kebijakan reward dan punishment	SK Reward sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Nomor: 188,46-010/ORANG tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (Reward) bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Punishment yang dijalankan berupa pemotongan Tunjangan Kinerja Komponen Disiplin Pegawai atas kedisiplinan Kehadiran Pegawai di Lingkungan sekretariat Daerah
3	Pengukuran Kinerja	menyusun SOP pengumpulan data kinerja perindikator Utama yang memudahkan dalam penelusuran data kinerja dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan	Telah disusun SOP Pengumpulan Data Kinerja Per Indikator Kinerja Utama sekretariat daerah 2025-2029
4	Pengukuran Kinerja	melakukan penyempurnaan inputan data aplikasi REAKSI, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi mulai dari tingkat Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah samapai tingkat Individu Pegawai	Telah dilakukan penginputan data capaian kinerja Sekretariat Daerah secara berkala tiap triwulan pada aplikasi REAKSI tetapi hanya terbatas pada Capaian Kinerja sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Prtogram, Kegiatan, Sub Kegiatan, belum terdapat menu pengukuran kinerja samapai dengan level Individu pada aplikasi REAKSI

5	Pengukuran Kinerja	Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerah	Telah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar lebih memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja Sekretariat Daerah
6	Pelaporan Kinerja	Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi yang Telah ditetapkan yang berisi Kendala/ Hambatan, rencana Tindak Lanjut dan dimonitoring hasil RATL (Rencana Aksi Tindak Lanjut) yang dilaksanakan pada TW I dan II tahun 2024 untuk memberikan gambaran atas kondisi capaian kinerja	Telah disusun Laporan Evaluasi Rencana Aksi Tw I dan TW II Tahun 2024
7	Pelaporan Kinerja	Dokumen Laporan Kinerja agar disusun secara berkala	Laporan Kinerja disusun secara berkala berupa Laporan Kinerja pada aplikasi REAKSI yang memuat Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Capaian Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan. Serta telah disusun secara berkala Laporan Evaluasi rencana Aksi
8	Pelaporan Kinerja	Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target tahun sebelumnya, sehingga perencanaan kinerja kedepan menggambarkan peningkatan kinerja	Pemanfaatan Laporan Kinerja telah dilakukan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, dimana Target Kinerja Perubahan didasarkan kepada capaian realisasi Kinerja pada tahun 2024
9	Evaluasi Kinerja	mendorong evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat dilakukan pada tahun berjalan sehingga dapat segera ditindaklanjuti serta mendorong perbaikan atas kualitas implementasi AKIP Perangkat Daerah	evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah terus didorong dan ditingkatkan oleh seluruh stakeholder dari level Pimpinan hingga Level pelaksana

Sumber : Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

Dengan adanya peningkatan nilai evaluasi SAKIP dan pelaksanaan tindak lanjut secara sistematis, diharapkan implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tahun berjalan dan tahun – tahun berikutnya dapat terus meningkat serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan penilaian Tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis organisasi. Penilaian capaian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Balikpapan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Penilaian Tingkat capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan interval capaian kinerja dan predikat capaian kinerja sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 13 : Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	> 100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang mencakup perbandingan antara target dan realisasi kinerja, Tingkat capaian kinerja, serta faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

3.2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun transisi perencanaan, sehingga pengukuran dan pelaporan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dilakukan dengan mengacu pada dua dokumen perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang masih mengacu pada Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026; dan
2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025-2029, sebagai bentuk penyesuaian awal

terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode perencanaan yang baru.

Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan akuntabilitas kinerja, serta memastikan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 tetap relevan baik terhadap target renstra lama maupun arah kebijakan Renstra baru.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

Tabel 14 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Targ et 202 5	Realis asi 2025	Capai an (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	77	77.05	100.06	Melebihi Target
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Skor LPPD	Poin	3.7018	3.7018	100	Tercapai/Sesuai Target
	bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	90.2	91.18	101.09	Melebihi Target
		Presentase Produk Hukum yang di Fasilitas dan di Harmonisasi	Persen	100	100	100	Tercapai/Sesuai Target
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Nilai Inflasi Daerah	Persen	2,5±1	2,71	100	Tercapai/Sesuai Target
	bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	74	77,89	105,26	Melebihi Target
		Presentase rata - rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	96.5	98.36	101.93	Melebihi Target

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

Pada sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, capaian kinerja menunjukkan hasil yang melampaui target. Kondisi ini mencerminkan komitmen Sekretariat Daerah dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Gambar 5 : Evaluasi



Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, capaian kinerja secara umum berada pada kategori tercapai dan melebihi target. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat telah berjalan efektif serta didukung oleh sinergi antarperangkat daerah yang optimal.

34	Perwakilan Pemerintah Daerah	1.000	100%
35	Perwakilan DPRD	1.000	100%
36	Perwakilan Masyarakat	1.000	100%
37	Perwakilan Akademisi	1.000	100%
38	Perwakilan Praktisi	1.000	100%
39	Perwakilan Organisasi Masyarakat	1.000	100%
40	Perwakilan Organisasi Perempuan	1.000	100%
41	Perwakilan Organisasi Pemuda	1.000	100%
42	Perwakilan Organisasi Lansia	1.000	100%
43	Perwakilan Organisasi Disabilitas	1.000	100%
44	Perwakilan Organisasi Nelayan	1.000	100%
45	Perwakilan Organisasi Petani	1.000	100%
46	Perwakilan Organisasi Buruh	1.000	100%
47	Perwakilan Organisasi Pengusaha	1.000	100%
48	Perwakilan Organisasi Profesi	1.000	100%
49	Perwakilan Organisasi Religi	1.000	100%
50	Perwakilan Organisasi Suku	1.000	100%

51	Perwakilan Pemerintah	1.000	100%
52	Perwakilan DPRD	1.000	100%
53	Perwakilan Masyarakat	1.000	100%



Gambar 6 : SK Mendagri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

$$\frac{31 \text{ (Kerjasama yang Ditindaklanjuti)}}{34 \text{ (Kerjasama yang Disepakati)}} \times 100\% = 91.18\%$$

$$\frac{\text{Produk Hukum yang Diajukan}}{\text{Produk Hukum yang Difasilitasi}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{502 \text{ produk hukum (9 perda, 28 perwali, 465 SK)}}{502 \text{ produk hukum (9 perda, 28 perwali, 465 SK)}} \times 100\% = 100\%$$

Sementara itu, pada sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan daerah bidang perekonomian dan pembangunan, capaian kinerja secara umum menunjukkan hasil yang baik. Seluruh indikator kinerja pada sasaran ini telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan sebagian di antaranya berhasil melampaui target, khususnya pada indikator nilai indeks tata kelola pengadaan serta persentase rata – rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan. Adapun indikator nilai indeks tata kelola nilai inflasi daerah juga telah berada pada rentang target yang ditetapkan, sehingga dapat dikategorikan tercapai/sesuai target. Dengan demikian, secara keseluruhan kinerja pada sasaran ini menunjukkan capaian yang positif dan mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan yang berjalan dengan baik.



Gambar 7 : Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Balikpapan Bulan Desember Tahun 2025

Waktu Interval	Area Interval	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000
----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Gambar 8 : Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah Tahun 2025

Seiring dengan dimulainya periode perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan juga menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang diselaraskan dengan Renstra terbaru. Perjanjian Kinerja ini mencerminkan penajaman tujuan, dan indikator kinerja sesuai dengan arah kebijakan Kepala Daerah pada periode perencanaan yang baru.

Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 15 : Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tujuan : Meningkatkan dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	69.98	69.96*	99.97% *	Tidak Tercapai *
		Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	8.32	8.32*	100% *	Tercapai/Sesuai Target*
1.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,7018	3,7018	100	Tercapai/Sesuai Target
		Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	90.2	91.18	101.09	Melebihi Target
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	%	90.2	91.67	101.63	Melebihi Target
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98.35	97.38	99.01	Tidak Tercapai
1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	Tercapai/Sesuai Target
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	74	77.89	105.26	Melebihi Target
		Persentase Rata-Rata capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	%	96.5	98.36	101.93	Melebihi Target
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	Nilai	9.72	9.51	97.84	Tidak Tercapai
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	77.05	100.06	Melebihi Target

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

*Menggunakan Data Capaian Tahun 2024 disebabkan data capaian tahun 2025 dikeluarkan di Bulan Maret oleh KemenPanRB

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini terlihat dari sebagian besar indikator kinerja yang telah mencapai, bahkan malampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2025, pengukuran kinerja Nilai Reformasi Birokrasi masih menggunakan data capaian tahun 2024, mengingat hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 dari Kementerian PANRB belum dirilis dan direncanakan baru akan diumumkan pada bulan Maret tahun 2026.

Berdasarkan data yang tersedia, Nilai Reformasi Birokrasi General tercatat sebesar 69,96 dari target 69,98, atau mencapai 99,97%, sehingga dikategorikan tidak tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa komponen penilaian yang perlu ditingkatkan agar target yang ditetapkan dapat terpenuhi.

Indeks RB Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2024 adalah **78,28** dengan kategori **"BB"**. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	2023	2024
A	RB General	100	56,02	69,96
B	RB Tematik	20	10,11	8,32
C	Indeks RB	120	66,13	78,28
			B	BB

Gambar 9 : Indeks RB Pemkot Balikpapan Tahun 2024

Sementara itu, Nilai Reformasi Birokrasi Tematik mencapai 8,32 atau 100% dari target, sehingga dikategorikan tercapai/sesuai target. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi tematik telah dilaksanakan

sesuai dengan fokus kebijakan yang ditetapkan, meskipun secara keseluruhan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari Kementerian PANRB.

Capaian kinerja pada sasaran strategis di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menunjukkan hasil yang relatif stabil. Target pada indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipenuhi, sementara beberapa indikator lainnya menunjukkan capaian yang melampaui target. Di sisi lain, terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, yang menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan ke depan.

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan}}{\text{Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi}} \times 100\%$			
$\frac{22 \text{ kebijakan}}{24 \text{ kebijakan}}$	x	100%	= 91.67%

Gambar 10 : Monitoring Indikator Kinerja Presentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan

CAPAIAN IRH TAHUN 2023 - 2025				
No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	HASIL NILAI IRH		
		2023	2024	2025
1.	Kabupaten Timor	17,87 (Cukup)	17,88 (Sangat Baik)	20,73 (Sangat Baik)
2.	Kabupaten Kutai Timur	-	17,46 (Sangat Baik)	19,56 (Sangat Baik)
3.	Kabupaten Kutai Barat	-	15,51 (Baik)	17,18 (Baik)
4.	Kabupaten Kutai Kartanegara	16,50 (Cukup Baik)	17,26 (Sangat Baik)	17,46 (Sangat Baik)
5.	Kabupaten Berau	-	16,46 (Sangat Baik)	20,28 (Sangat Baik)
6.	Kabupaten Mahakam Ulu	-	-	17,24 (Sangat Baik)
7.	Kabupaten Paser	-	-	16,38 (Sangat Baik)
8.	Kabupaten Pongkor Paser Utara	-	17,36 (Sangat Baik)	17,88 (Baik)
9.	Kota Samarinda	15,89 (Cukup)	17,38 (Sangat Baik)	17,63 (Sangat Baik)
10.	Kota Balikpapan	16,83 (Baik)	16,83 (Sangat Baik)	17,38 (Sangat Baik)
11.	Kota Bontang	17,67 (Baik)	17,73 (Sangat Baik)	19,68 (Sangat Baik)

Gambar 11 : Capaian IRH Tahun 2023-2025

Pada bidang Perekonomian dan Pembangunan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian yang positif. Seluruh indikator pada sasaran ini dapat memenuhi target

yang ditetapkan, bahkan sebagian di antaranya melampaui target. Kondisi tersebut mencerminkan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah.

Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{\text{Jumlah Kebijakan Perekonomian Daerah yang difasilitasi}}$

$$\frac{10 \text{ Kebijakan}}{10 \text{ Kebijakan}} \times 100\% = 100\%$$

Gambar 12 : Monitoring Indikator Kinerja Kebijakan Perekonomian yang Difasilitasi

Gambar 13 : Laporan Aplikasi Siperangko Tahun 2025

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan capaian yang baik. Sementara itu, capaian Nilai AKIP Komponen Pelaporan pada tahun 2025 sebesar 9,51 dari target 9,72, atau mencapai 97,84%, sehingga dikategorikan tidak tercapai. Meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan, capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah secara umum sudah berada pada tingkat yang baik. Ke depan, diperlukan peningkatan pada aspek kelengkapan, ketepatan waktu, serta

konsistensi penyajian data kinerja agar kualitas pelaporan dapat semakin meningkat dan selaras dengan standar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.2.2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Subbab ini menyajikan analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat tren capaian kinerja, tingkat konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan, serta efektifitas upaya perbaikan kinerja yang telah dilakukan dari waktu ke waktu.

Tabel berikut menyajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja utama berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan capaian pada tahun sebelumnya serta beberapa tahun terakhir.

Tabel 16 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	75,71	-	76,05	96,88%	76,33	96,62%	77,05	100,06
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang	Skor LPPD	2,51	-	3,16	120,94%	3,16	100%	3,7018	100
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	95,65%	-	100	133,33%	90%	94,74%	91,18	101,09

	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Produk Hukum yang di Fasilitas dan di Harmonisasi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100	100
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	0,20%	-	3,60%	80,00%	1,11%	225.23%	2,71	100
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	43.10	-	58.34	100.59%	73.70	116.06%	77,89	105,26
		Presentase rata - rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	95.74%	-	96.64%	99.63%	96.49%	101.57%	98.36	101.93

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel perbandingan realisasi dan capaian kinerja, secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta Upaya perbaikan kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, indikator Nilai SAKIP pada tahun 2025 mencapai 77.05 dengan capaian sebesar 100.06%, yang menunjukkan bahwa upaya penguatan system akuntabilitas kinerja telah berjalan efektif dan mampu memenuhi target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Skor LPPD pada Tahun 2025 tercapai sesuai target dengan capaian 100%, setelah sebelumnya mengalami capaian yang melebihi target pada tahun 2023. Sementara itu, indikator persentase kerja sama

yang ditindaklanjuti menunjukkan capaian sebesar 101.09%, yang meskipun sedikit menurun dibandingkan capaian tertinggi pada Tahun 2023, namun tetap berada pada kategori sangat baik. Indikator persentase produk hukum yang difasilitasi dan diharmonisasi secara konsisten mencapai 100% dari Tahun 2022 hingga 2025, mencerminkan stabilitas kinerja pada aspek tersebut.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan, indikator Nilai Inflasi Daerah menunjukkan fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Namun demikian, pada Tahun 2025, capaian inflasi daerah sebesar telah berada pada Tingkat 100%, yang menunjukkan bahwa target telah tercapai, penguatan koordinasi dan pengendalian inflasi tetap perlu dilakukan guna menjaga stabilitas capaian pada tahun – tahun berikutnya. Sementara itu, indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan capaian 105,26% pada tahun 2025, setelah sebelumnya mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2023 dan 2024.

Adapun indikator persentase rata – rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan pada Tahun 2025 mencapai 101.93% yang menunjukkan kinerja pelaksanaan pembangunan fisik yang efektif dan konsisten dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah mampu menjaga kinerja yang relatif stabil serta menunjukkan kecenderungan peningkatan pada

sebagian besar indikator kinerja. Capaian tersebut mencerminkan adanya upaya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Meskipun demikian, penguatan dan penyempurnaan tetap diperlukan pada beberapa indikator tertentu guna menjaga konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja di masa mendatang.

Selanjutnya, disajikan perbandingan realisasi dan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025 – 2029 pada tabel berikut :

Table 17 : Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022			2023			2024			2025	
			Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)		Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5		6	7		8	9		11	12
1	Meningkatnya dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	-	-		56.02	-		69.96	-		69.96*	99.97*
		Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	-	-		10.11	-		8.32	-		8.32*	100*
1.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Lapangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	2.51	-		3.16	120.94%		3.16	100%		3,7018	100%
		Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	95.65	-		100	133.33%		90%	94.74%		91.18	101.09
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	-	-		-	-		-	-		91.67	101.63
		Indeks Reformasi Hukum	-	-		76.65	-		98.32	-		97.38	99.01
1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	-	-		-	-		-	-		100	100

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Tahun 2025–2029, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang cukup konsisten dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya serta sejalan dengan arah kebijakan jangka menengah yang telah ditetapkan.

Pada tujuan strategis dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang berkualitas, indikator nilai Reformasi Birokrasi General menunjukkan peningkatan dari 56,02 pada tahun 2023 menjadi 69,96 pada tahun 2024 dan tetap berada pada angka 69,96 pada tahun 2025, dengan capaian sebesar 99,97 persen terhadap target. Sementara itu, nilai Reformasi Birokrasi Tematik tercatat sebesar 8,32 pada tahun 2024 dan tetap pada angka yang sama pada tahun 2025 dengan capaian 100 persen. Perlu disampaikan bahwa nilai Reformasi Birokrasi tahun 2025 masih menggunakan data capaian tahun 2024, mengingat hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 dari Kementerian PANRB belum dirilis dan dijadwalkan akan diumumkan pada bulan Maret tahun 2026.

Pada sasaran strategis bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, indikator Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun 2025 mencapai target yang ditetapkan. Indikator kerja sama daerah yang ditindaklanjuti juga menunjukkan capaian yang baik, meskipun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terlihat adanya fluktuasi. Sementara itu, indikator persentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan sebagai indikator dalam periode

Renstra mulai menunjukkan hasil yang positif pada Tahun 2025. Indeks Reformasi Hukum pada Tahun 2025 tetap berada pada tingkat capaian yang tinggi, walaupun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Pada sasaran strategis bidang perekonomian dan pembangunan, indikator persentase rumusan kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 telah tercapai sesuai target. Indeks Tata Kelola Pengadaan dan persentase rata-rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan juga menunjukkan kinerja yang stabil dan konsisten dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pada sasaran strategis akuntabilitas kinerja, indikator nilai AKIP Komponen Pelaporan menunjukkan kondisi yang relatif stabil pada periode 2022–2024, yaitu sebesar 69,50 pada tahun 2022, 68,75 pada tahun 2023, dan 69,06 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, nilai AKIP Komponen Pelaporan tercatat sebesar 9,51 dengan capaian 97,84 persen terhadap target, yang menunjukkan bahwa kinerja pada komponen pelaporan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 telah mendukung pelaksanaan Renstra Tahun 2025–2029, dengan beberapa indikator yang masih menunggu hasil penilaian sebagai bagian dari mekanisme evaluasi eksternal.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Subbab ini menyajikan perbandingan realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Perbandingan ini dilakukan untuk melihat tingkat keselarasan antara capaian kinerja tahunan dengan target kinerja jangka menengah, baik pada Renstra periode sebelumnya maupun Renstra periode yang sedang berjalan.

Tabel berikut menyajikan perbandingan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021–2026.

Tabel 18 : Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=6/8*100
1	Menigkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	N/A	77.05	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kinerja	Skor LPPD	Poin	N/A	3.7018	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	91.18	N/A	N/A	N/A
		Presentase Produk Hukum yang di Fasilitasi dan di Harmonisasi	Persen	N/A	100	N/A	N/A	N/A
3	Meningkatnya Kinerja	Nilai Inflasi Daerah	Persen	N/A	2,71	N/A	N/A	N/A
	Penyelenggaraan Daerah bidang	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	N/A	77.89	N/A	N/A	N/A
	Perekonomian dan Pembangunan	Presentase rata - rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Persen	N/A	98.36	N/A	N/A	N/A

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

Sehubungan dengan adanya revisi dan perbaikan terhadap Indikator Kinerja Utama yang diampu oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Kota Balikpapan, maka indikator kinerja pada sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Tahun 2021–2026. Hal tersebut disebabkan adanya ketidaksesuaian indikator dan target kinerja antara dokumen Rencana

Strategis dan dokumen Indikator Kinerja Utama yang telah disesuaikan.

Selanjutnya, di bawah ini disajikan tabel perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, sebagai gambaran awal ketercapaian target pada periode awal pelaksanaan Renstra.

Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9=6/8*100
1	Tujuan : Meningkatnya dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	69.98	69.96*	99.97*	70.58	99.12*
		Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	8.32	8.32 *	100*	8.42	98.81*
1.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3.7018	3.7018	100	3.707	99.86
		Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	90.2	91.18	101.09	91.2	99.98
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	%	90.2	91.67	101.63	91.2	100.52
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98.35	97.38	99.01	98.6	98.76

1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100.00
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	74	77.89	105.26	74.5	104.55
		Persentase Rata-Rata capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	%	96.5	98.36	101.93	96.8	101.61
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	Nilai	9,72	9.51	97.84	10.1	94.16
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.03	77.05	100.03	78.8	97.78

Sumber : Laporan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025

*Menggunakan Data Capaian Tahun 2024 disebabkan data capaian tahun 2025 dikeluarkan di Bulan Maret oleh KemenPanRB

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah Renstra Tahun 2025–2029, secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang baik dan berada pada jalur pencapaian target jangka menengah, meskipun sebagian indikator masih berada pada tahap awal pelaksanaan Renstra.

Pada Reformasi Birokrasi General pada tahun 2025 tercatat sebesar 69,96 atau mencapai 99,97 persen dari target tahunan sebesar 69,98. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 70,58, capaian tahun 2025 telah mencapai 99,12 persen. Sementara itu, nilai Reformasi Birokrasi Tematik pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,32 atau mencapai 100 persen dari target tahunan, dan telah mencapai 98,81 persen terhadap target akhir Renstra sebesar 8,42. Perlu disampaikan bahwa nilai Reformasi Birokrasi tahun 2025 masih menggunakan data capaian tahun 2024,

mengingat hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 dari Kementerian PANRB belum dirilis dan direncanakan akan diumumkan pada bulan Maret tahun berikutnya.

Pada sasaran strategis bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, sebagian besar indikator telah menunjukkan capaian yang mendekati bahkan melampaui target jangka menengah. Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencapai 99,86% terhadap target akhir Renstra, sementara indikator kerja sama daerah yang ditindaklanjuti dan rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat yang ditetapkan masing-masing mencapai 99,98% dan 100,52%. Indeks Reformasi Hukum mencapai 98,76% terhadap target akhir Renstra, yang menunjukkan konsistensi capaian meskipun realisasi Tahun 2025 sedikit di bawah target tahunan.

Pada sasaran strategis bidang perekonomian dan pembangunan, indikator persentase rumusan kebijakan perekonomian daerah yang ditindaklanjuti telah mencapai 100% dan sepenuhnya sejalan dengan target jangka menengah. Indeks Tata Kelola Pengadaan mencapai 104,55% terhadap target akhir Renstra, sementara persentase rata-rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan mencapai 101,61%, yang menunjukkan kinerja pelaksanaan pembangunan daerah telah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan.

Pada sasaran strategis akuntabilitas kinerja, indikator nilai AKIP Komponen Pelaporan pada tahun 2025 tercatat sebesar 9,51 atau mencapai 97,84 persen dari target tahunan sebesar 9,72. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2029 sebesar 10,10, capaian tahun 2025 baru

mencapai 94,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pada komponen pelaporan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai target akhir Renstra yang telah ditetapkan. Sementara itu, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah telah mencapai 97,78% terhadap target akhir Renstra Tahun 2029, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja telah mendekati target jangka menengah pada tahap awal periode Renstra.

Secara keseluruhan, perbandingan realisasi kinerja sampai Tahun 2025 terhadap target jangka menengah Renstra Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah berada pada arah pencapaian yang sesuai.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

Subbab perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), standar nasional, maupun standar internasional (*benchmark* kinerja) dilakukan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan telah memenuhi standar yang ditetapkan. *Benchmark* ini digunakan sebagai alat ukur objektif dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

Hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai posisi capaian kinerja saat ini, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Adapun

perbandingan realisasi kinerja dimasuk dan disajikan
sebagaimana tabel di bawah ini :

Table 20 : Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap
SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Real isasi 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/Int ernasional/dll) 2025	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Menigkat nya Kualitas Akuntabil itas Kinerja Instansi Pemerint ah	Nilai SAKIP Sekretari at Daerah	Poi n	77.0 5	83.68	Sekret ariat Daera h Kota Bonta ng	Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025
2	Meningka tanya Kinerja Penyelen ggaraan Daerah bidang Pemerint ahan dan Kesejahte raan Rakyat	Skor LPPD	Poi n	3.70 18	3.5820	Kota Samar inda	Berdasarkan SK Menteri Nomor 100.2.1.7- 2109
					3.0659	Kota Bonta ng	
		Presenta se Kerjasam a yang ditindakl anjuti	Per sen	91.1 8	-		-
		Presenta se Produk Hukum yang di Fasilitasi	Per sen	100	-		-

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Real isasi 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/Int ernasional/dll) 2025	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
		dan di Harmonis asi					
3	Meningka tanya Kinerja Penyelen ggaraan Daerah bidang Perekono mian dan Pembang unan	Nilai Inflasi Daerah	Per sen	2.71	2.70	Kota Samar inda	Nilai Inflasi y-on-y bulan Desember Tahun 2025 berdasarkan data BPS
					2.82	Kabup aten Berau	
					2.08	Kabup aten Penaj am Paser Utara	
					2.68	Pem. Prov. Kalim antan Timur	
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengada an	Poi n	77.8 9	79.96	Kota Samar inda	Berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025
					87.10	Kota Bonta ng	
					89.57	Pem. Prov. Kalim antan Timur	

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat uan	Real isasi 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/Int ernasional/dll) 2025	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	
		Presenta se rata - rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapa n	Per sen	98.3 6	-		-

Sumber : BPS, LKPP, LHE AKIP Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 dengan benchmark kinerja (SPM/standar nasional/daerah pembanding) menunjukkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berada pada kondisi yang bervariasi antar indikator.

Pada indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah, realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 77,05 poin masih berada di bawah benchmark Kota Bontang sebesar 83,68 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan agar dapat menyamai atau melampaui capaian pemerintah daerah pembanding.

Untuk indikator Skor LPPD, realisasi kinerja sebesar 3,7018 poin menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan benchmark Kota Samarinda sebesar 3,5820 poin dan Kota Bontang sebesar 3,0659 poin. Capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berada pada tingkat yang relatif lebih baik dibandingkan daerah pembanding.

Pada indikator Persentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti dan Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi dan Diharmonisasi, realisasi kinerja masing-masing sebesar 91,18 persen dan 100 persen. Namun demikian, kedua indikator tersebut belum memiliki benchmark pembandingan, sehingga capaian kinerja belum dapat dianalisis secara komparatif terhadap standar atau daerah lain.

Pada indikator Nilai Inflasi Daerah, realisasi inflasi Kota Balikpapan sebesar 2,71 persen relatif sebanding dengan benchmark Kota Samarinda sebesar 2,70 persen dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 2,68 persen, namun masih lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,08 persen dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Berau sebesar 2,82 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kota Balikpapan berada pada kisaran yang masih sejalan dengan rata-rata daerah di Kalimantan Timur.

Selanjutnya, pada indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), realisasi kinerja sebesar 77,89 poin masih berada di bawah benchmark Kota Samarinda sebesar 79,96 poin, Kota Bontang sebesar 87,10 poin, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar 89,57 poin. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan masih perlu ditingkatkan agar dapat menyamai capaian daerah pembandingan.

Sementara itu, pada indikator Persentase Rata-rata Capaian Realisasi Fisik, realisasi kinerja mencapai 98,36 persen, namun belum tersedia benchmark pembandingan

sehingga capaian tersebut belum dapat dibandingkan secara langsung dengan standar atau daerah lain.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa sebagian indikator telah mencapai kinerja yang lebih baik atau sebanding dengan benchmark, namun masih terdapat indikator strategis yang memerlukan peningkatan kinerja agar dapat mendekati atau melampaui capaian daerah pembanding pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja jangka menengah, dilakukan perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), standar nasional, maupun praktik kinerja pada pemerintah daerah lain, berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat posisi capaian kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029. Adapun perbandingannya disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 21 : Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Benchmark Kinerja (SPM/Nasional/Internasional/dll) 2025	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatkan dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	69.96*	-	-
		Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	8.32*	-	-
1.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Lapangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,7018	**	**
		Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti	%	91.18	-	-
		Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan	%	91.67	100.00	Capaian Kabupaten Kukar tahun 2025
		Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97.38	98.60	IRH Kota Bontang Tahun 2025
					87.62	IRH Kota Samarinda
					86.72	IRH Provinsi Kalimantan Timur

1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	Capaian Kota Malang Tahun 2024
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	77.89	**	**
		Persentase Rata-Rata capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	%	98.36	-	-
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen pelaporan	Nilai	9.51	-	-
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77.05	**	**
	*Data capaian tahun 2024, disebabkan data capaian tahun 2025 belum dirilis					
	** Data yang sama sudah dijelaskan pada tabel 20					

Sumber , Satu Data Malang ,e-sakip kukar

Berdasarkan tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2025 terhadap *benchmark*, secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan tren yang positif dan berada pada kategori baik. Pada tujuan peningkatan dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, indikator Reformasi Birokrasi masih menggunakan data capaian terakhir yang tersedia, mengingat hasil penilaian tahun berjalan belum dirilis secara nasional. Meskipun demikian, capaian yang ada menunjukkan konsistensi komitmen terhadap penguatan tata kelola dan reformasi kelembagaan.

Pada sasaran peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas kebijakan bidang pemerintahan serta kesejahteraan rakyat, kinerja yang dicapai menunjukkan efektivitas koordinasi dan perumusan kebijakan daerah. Jika dibandingkan dengan capaian daerah lain maupun standar pembanding yang tersedia, posisi Kota Balikpapan berada dalam rentang yang kompetitif, khususnya pada aspek reformasi hukum yang menunjukkan performa relatif lebih tinggi dibandingkan beberapa daerah pembanding di tingkat regional.

Untuk bidang perekonomian dan pembangunan, capaian indikator menunjukkan tingkat tindak lanjut kebijakan yang optimal serta pengendalian pelaksanaan pembangunan yang berjalan efektif. Perbandingan dengan daerah lain yang dijadikan acuan memperlihatkan bahwa kinerja Sekretariat Daerah tetap berada pada posisi yang sejalan dengan praktik baik tata kelola pembangunan daerah.

Sementara itu, pada sasaran peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, nilai komponen

pelaporan AKIP dan akuntabilitas perangkat daerah mencerminkan penguatan sistem perencanaan, pengukuran, serta evaluasi kinerja internal. Beberapa indikator perbandingan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya guna menghindari pengulangan analisis, namun secara substansi menunjukkan konsistensi peningkatan kualitas tata kelola berbasis kinerja.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan dengan benchmark nasional maupun regional mengindikasikan bahwa kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 telah berjalan sesuai arah Perjanjian Kinerja Perubahan dan Renstra 2025–2029, dengan ruang perbaikan yang tetap menjadi perhatian dalam rangka menjaga keberlanjutan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Subbab ini menyajikan analisis terhadap penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan, serta faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan maupun penurunan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025. Analisis ini disusun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi capaian kinerja, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, pada subbab ini juga diuraikan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dan/atau akan dilakukan sebagai dasar peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Tabel berikut menyajikan analisis penyebab keberhasilan dan/atau kegagalan, serta peningkatan atau penurunan kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Analisis ini difokuskan pada keterkaitan antara target dan realisasi kinerja, dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi capaian setiap indikator kinerja, serta merumuskan alternatif solusi yang telah dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah.

Tabel 22 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satu an	Targe t 2025	Realisa si 2025	Capaia n (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagal an	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Renca na Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	77	77.05	100.06	Keberhasilan pencapaian nilai AKIP Sekretariat Daerah didukung oleh penguatan komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam penerapan SAKIP, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta perbaikan kualitas pelaporan kinerja yang semakin akuntabel dan terintegrasi.	Penguatan perencanaan berbasis kinerja, penyelarasan indikator, peningkatan monev, pendampingan SAKIP, dan perbaikan kualitas pelaporan kinerja.	Ke depan, akan dilakukan penguatan kualitas indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah, peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP guna menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD	Poin	3.701 8	3.7018	100	Pemenuhan kualitas data dukungan per indikator kinerja kunci yang tepat waktu, komitmen Pimpinan dan Kepala OPD dalam memenuhi data dukungan	Melaksanakan rapat kerja dan desk dengan narasumber dari kementerian dan OPD pengampu LPPD guna menyamakan persepsi terkait Indikator Kinerja Kunci	Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu secara berkelanjutan
		Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Persen	90.2	91.18	101.09	Komitmen dan berkoordinasi dengan instansi yang melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Balikpapan baik instansi vertikal, pemerintah daerah lain maupun pihak ketiga seperti universitas	Monitoring dan evaluasi atas kerjasama yang sedang berjalan dan akan dilaksanakan	Membuat SOP Kerjasama dalam negeri, kerjasama luar negeri, perjalanan dinas dan mengali potensi daerah lain untuk memenuhi kebutuhan kota Balikpapan, kerjasama dengan daerah lain di bidang pariwisata dengan memanfaatkan lokasi kota Balikpapan

3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	Persen	2,5±1	2,71	100.00	Efektifnya sinergi antara internal TPID (BI, Disdag, DKP3, Bulog, Perumda Manuntung Sukses) kota Balikpapan melalui pelaksanaan High Level Meeting yang di Fasilitas oleh Bag. Perekonomian, termasuk melakukan operasi pasar dan sidak pasar yang dilakukan oleh disdag	Melakukan peningkatan kompetensi TPID Kota Balikpapan (capacity building) ke TPID daerah lain, menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan ekonomi	Penyampaian arahan dari kepala daerah atau sekretaris daerah dalam High Level Meeting
----------	---	----------------------	--------	-------	------	--------	--	--	---

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

a. Indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Pada Tahun 2025, capaian Nilai SAKIP Sekretariat Daerah mencapai 100,06% dari target yang ditetapkan. Capaian ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip SAKIP secara konsisten. Dalam pelaksanaannya, penguatan perencanaan berbasis kinerja dilakukan melalui penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran strategis, serta peningkatan kualitas pengukuran kinerja pada setiap unit kerja.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, Sekretariat Daerah secara rutin melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi kinerja. Kegiatan ini menjadi forum pengendalian internal untuk memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja berjalan secara selaras dan konsisten dengan prinsip-prinsip SAKIP.

Dalam rapat ini, masing-masing bagian memaparkan capaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut perbaikan. Proses evaluasi tidak hanya difokuskan pada capaian angka, tetapi juga pada kualitas perencanaan, kesesuaian indikator, serta efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Melalui mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan ini, kualitas pelaporan kinerja semakin meningkat dan terintegrasi, sehingga berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP Sekretariat Daerah yang pada Tahun 2025 berhasil melampaui target.

Gambar 14 : Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kinerja Sekretariat Daerah



2. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Indikator Skor LPPD

Capaian Skor LPPD Tahun 2025 tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh terpenuhinya kualitas dan kelengkapan data dukung pada setiap indikator kinerja kunci, yang disusun secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Komitmen pimpinan dan kepala OPD menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh data dukung dapat dipenuhi dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Balikpapan, Sekretariat Daerah melaksanakan rapat kerja penyusunan LPPD yang diikuti oleh perangkat daerah terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman mengenai substansi, sistematika, serta kelengkapan data dan dokumen pendukung yang menjadi dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain rapat kerja, dilaksanakan pula kegiatan desk penyusunan LPPD per perangkat daerah, sebagai forum pembahasan teknis dan verifikasi data secara lebih rinci.

Melalui mekanisme desk ini, masing-masing perangkat daerah melakukan klarifikasi, perbaikan, dan penyempurnaan data kinerja, sehingga informasi yang disajikan dalam LPPD menjadi lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rangkaian kegiatan tersebut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas dokumen LPPD, baik dari sisi kelengkapan substansi maupun kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Dengan dukungan koordinasi yang intensif dan pendampingan teknis yang berkelanjutan, Sekretariat Daerah mampu mendorong peningkatan capaian Skor LPPD pada Tahun 2025 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Gambar 15 : Rapat Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan



Gambar 16 : Desk Perangkat Daerah



b. Indikator Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator ini pada Tahun 2025 mencapai 101,09%, melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan kuatnya komitmen dan koordinasi antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan berbagai pihak, baik instansi vertikal, pemerintah daerah lain, maupun pihak ketiga seperti perguruan tinggi. Kerjasama yang telah terjalin tidak hanya berhenti pada tahap penandatanganan, tetapi secara aktif ditindaklanjuti melalui berbagai kegiatan konkret.

Untuk menjaga efektifitas kerjasama tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Melalui forum fasilitasi ini, dilakukan pembahasan terhadap progres pelaksanaan kerja sama, identifikasi hambatan, serta perumusan langkah-langkah percepatan tindak lanjut. Pendekatan koordinatif dan komunikatif yang dilakukan secara berkelanjutan mendorong meningkatnya persentase kerja sama yang ditindaklanjuti pada Tahun 2025 hingga melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan Kota Balikpapan.

Gambar 17: Fasilitasi Kerjasama



c. Indikator Persentase Produk Hukum yang Difasilitasi dan Diharmonisasi

Pada indikator ini, capaian Tahun 2025 mencapai 100% sesuai dengan target. Capaian tersebut didukung oleh tingginya tingkat koordinasi antara perangkat daerah dalam pengusulan produk hukum, serta pemanfaatan aplikasi e-harmonisasi dan e-perda dalam proses penyusunan produk hukum. Selain itu, keberadaan program *e-harmonisasi one day service* dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur turut mempercepat proses harmonisasi dan fasilitasi produk hukum.

Dalam pelaksanaannya, penerapan aplikasi dalam penyusunan produk hukum telah membantu meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses kerja. Ke depan, peningkatan kapasitas SDM melalui bimbingan teknis penyusunan produk hukum serta penambahan SDM bidang hukum pada perangkat daerah akan terus didorong guna menjaga kualitas produk hukum yang dihasilkan.

Gambar 18 : Kegiatan Harmonisasi Produk Hukum Bidang Stunting



3. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

a. Indikator Nilai Inflasi Daerah

Capaian Nilai Inflasi Daerah pada Tahun 2025 mencapai 100,00% sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan efektifnya sinergi antara unsur internal Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang melibatkan Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, DKP3, Bulog, Perumda Manuntung Sukses, dan perangkat terkait lainnya. Sinergi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan *High Level Meeting* yang difasilitasi oleh Bagian Perekonomian, sebagai forum koordinasi strategis dalam pengendalian inflasi.

Selain itu, langkah-langkah konkret seperti pelaksanaan operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) pasar oleh Dinas Perdagangan turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga. Untuk memperkuat kinerja TPID, dilakukan peningkatan kompetensi melalui kegiatan *capacity building* dengan belajar ke TPID daerah lain, serta menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait kebijakan ekonomi. Ke depan, penyampaian arahan langsung dari Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah dalam *High Level Meeting* akan terus dioptimalkan sebagai bentuk penguatan pengendalian inflasi daerah.

Gambar 19 : High Level Meeting TPID Inflasi Daerah Kota Balikpapan



b. Indikator Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan

Capaian indikator ini pada Tahun 2025 mencapai 105,26%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh terpenuhinya kebutuhan SDM pengelola pengadaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi SIRUP, serta perbaikan pada aspek perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Dalam praktiknya, dilakukan berbagai upaya peningkatan kapasitas, antara lain melalui diklat peningkatan kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan *on desk* perencanaan SIRUP, serta *on desk* realisasi pengadaan barang dan jasa. Ke depannya, optimalisasi ketepatan waktu perencanaan dan pelaksanaan pengadaan di OPD akan terus didorong, disertai dengan pendampingan dan pembinaan terhadap para pelaku pengadaan, baik internal maupun eksternal, serta penerbitan surat edaran terkait penyelesaian pengadaan dalam sistem pengadaan.

c. Indikator Persentase Rata-Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan

Capaian indikator ini pada Tahun 2025 mencapai 101,93%, melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD yang dilakukan secara berkala. Kegiatan monev tersebut menjadi instrumen penting dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan agar tetap berada pada jalur yang telah direncanakan.

Sebagai tindak lanjut, dilakukan desk kepada OPD yang realisasi fisik dan serapan anggarannya belum sesuai dengan target, serta pengembangan fitur dashboard khusus

bagi pimpinan untuk memantau perkembangan realisasi secara lebih cepat dan akurat. Ke depan, penyampaian progres realisasi fisik secara rutin di level pimpinan dan kepala OPD akan terus dilakukan guna memperkuat pengendalian dan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Tabel berikutnya menyajikan Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029. Melalui tabel ini ditampilkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025, disertai identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta rekomendasi perbaikan.

Tabel 23 : Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan : Meningkatkan dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	69.98*	69.96*	99.97*	Belum optimalnya keterlibatan dan kesiapan Perangkat Daerah penanggung jawab kegiatan utama dalam mengikuti penilaian yang dilakukan oleh instansi pembinaan, sehingga hasil evaluasi belum maksimal.	Melaksanakan koordinasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah penanggung jawab kegiatan utama untuk memastikan partisipasi aktif dalam proses penilaian oleh instansi pembinaan.	Memperkuat sinergi dan monitoring terhadap Perangkat Daerah yang menjadi lokus penilaian, serta memastikan pemenuhan kriteria dan indikator penilaian dari instansi pembinaan secara konsisten.

	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	8.32*	8.32*	100*	Implementasi program prioritas tematik berjalan sesuai rencana dan dukungan lintas Perangkat Daerah relatif konsisten sehingga target dapat tercapai.	Melakukan koordinasi lintas Daerah dan pemantauan berkala terhadap progres pelaksanaan RB Tematik.	Meningkatkan kualitas implementasi program tematik agar capaian tetap konsisten dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik.
1.1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Lapangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,7018	3,7018	100	Pemenuhan kualitas data pendukung per indikator kinerja kunci yang tepat waktu, komitmen Pimpinan dan Kepala OPD dalam memenuhi data dukung	Melaksanakan rapat kerja dan desk dengan narasumber dari kemandagri dan OPD pengampu LPPD guna menyamakan persepsi terkait Indikator Kinerja Kunci	Melaksanakan koordinasi dengan OPD pengampu secara berkelanjutan

		Persentase Rumusan Kebijakan Rakyat yang Ditetapkan	%	90.2	91.67	101.63	Keberhasilan didukung oleh penguatan koordinasi lintas OPD dan instansi vertikal (Kemenag, Bappeda, BMKG, dan perangkat daerah terkait), dukungan anggaran yang memadai, serta kolaborasi dengan akademisi dan masyarakat dalam pelaksanaan program strategis, termasuk kegiatan keagamaan, sosial, dan fasilitasi koordinasi kelembagaan.	Penguatan fungsi koordinasi dengan instansi terkait dan masyarakat, peningkatan efisiensi penggunaan anggaran, serta optimalisasi forum komunikasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan program bina mental spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesehatan masyarakat.	Peningkatan frekuensi monitoring dan evaluasi lapangan terkait hibah, pemutakhiran data santri pondok pesantren, serta penguatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi program beasiswa, disertai optimalisasi forum komunikasi dalam perumusan kebijakan kesejahteraan rakyat.
--	--	---	---	------	-------	--------	--	---	--

	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	98.35	97.38	99.01	Perubahan standar variabel dan indikator penilaian yang berubah dari tahun sebelumnya sehingga menyebabkan kurang maksimal dalam pemenuhan data dukung seperti : variabel perancang perundang-undangan dan tingkat kehadiran eselon II pada harmonisasi regulasi, serta kurangnya kegiatan evaluasi atas produk hukum	Menyiapkan data dukung sesuai standar penilaian, mengusulka n formasi jabatan perancang perundang-undangan, meningkatkan n pelaksanaan kegiatan evaluasi produk hukum	Melibatkan eselon II dalam kegiatan harmonisasi produk hukum daerah, menambah perancang perundang-undangan, meningkatkan koordinasi dengan instansi vertikal kelengkapan harmonisasi produk hukum, Bimtek terkait penilaian IRH
1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	100	100	100	Fungsi koordinasi yang dijalankan dengan Disdag,DKP3,DKUKMP,Perumda Tirta Manuntung, Perumda Manuntung Sukses, BI, Bulog (TPID) terkait perumusan kebijakan perekonomian	Penguatan fungsi koordinasi dengan TPID	Meningkatkan fungsi koordinasi dan sinergi terkait kebijakan perekonomian

	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	74	77.89	105.26	Terpenuhinya kebutuhan SDM yang pada tahun sebelumnya terdapat 20 pegawai, ditahun 2025 mendapat tambahan SDM 6 orang menjadi 26 pegawai, movev SIRUP, perencanaan, dan pelaksanaan brg dan jasa	Diklat peningkatan kompetensi pejabat pengadaan barang dan jasa, on desk perencanaan SIRUP, on desk realisasi pengadaan brg dan jasa	Mengoptimalkan ketepatan waktu perencanaan dan pelaksanaan brg dan jasa di OPD, Pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku pengadaan brg dan jasa baik internal dan eksternal, membuat surat edaran terkait penyelesaian pengadaan brg dan jasa dalam sistem pengadaan
	Persentase Rata-Rata capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan	%	96.5	98.36	101.93	Efektifnya kegiatan movev pelaksanaan APBD secara berkala	Desk kepada OPD yang serapan anggarannya belum sesuai target dan menambah fitur dashboard khusus pimpinan untuk melihat progress realisasi	Penyampaian progress realisasi fisik di level pimpinan dan kepala OPD

1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen pelaporan	Nilai	9.72	9.51	97.84	Nilai komponen pelaporan kinerja Kota Balikpapan Tahun 2025 belum mencapai target disebabkan oleh: 1. Belum optimalnya pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya; 2. Kurangnya integrasi antara proses evaluasi dan penyusunan target PK; 3. Penetapan target yang belum sepenuhnya berbasis data historis dan tren capaian;	1. Melaksanak an koordinasi dan verifikasi penyesuaian target Perjanjian Kinerja dengan menggunakan n realisasi capaian tahun sebelumnya sebagai dasar penetapan target. 2. Memberikan arahan kepada Perangkat Daerah agar setiap target yang tidak mengacu atau lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya disertai alasan yang	1. Optimalisasi Pemanfaatan Laporan Kinerja Melakukan review kinerja Perangkat Daerah dan memastikan hasil analisis capaian serta rekomendasi dalam Laporan Kinerja digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan Perjanjian Kinerja tahun berikutnya. 2. Penguatan Integrasi Evaluasi dan PK Melaksanakan asistensi dan validasi rancangan Perjanjian Kinerja untuk menjamin konsistensi antara capaian tahun sebelumnya dan target yang ditetapkan, termasuk kewajiban penyampaian
-----	--	-------------------------------	-------	------	------	-------	---	--	---

justifikasi atas perubahan target. 3. Penetapan Target Berbasis Data Mewajibkan penetapan target kinerja berdasarkan data historis dan analisis tren capaian, disertai dasar perhitungan yang jelas agar target lebih realistis dan terukur.	jelas dan dituangkan dalam Berita Acara sebagai bentuk akuntabilitas.
---	--

	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	77	77.05	100.06	Keberhasilan pencapaian nilai AKIP Sekretariat Daerah didukung oleh penguatan komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam penerapan SAKIP, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta perbaikan kualitas pelaporan kinerja yang semakin akuntabel dan terintegrasi.	Penguatan perencanaan berbasis kinerja, penyelarasan indikator, peningkatan monev, pendampingan SAKIP, dan perbaikan kualitas pelaporan kinerja.	Ke depan, akan dilakukan penguatan kualitas indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah, peningkatan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam pengambilan keputusan, optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola SAKIP guna menjaga dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.
--	-----------------------------	-------	----	-------	--------	---	--	--

*Data Capaian Tahun 2024, Karena capaian tahun 2025 belum dirilis Sumber : Rapat Evaluasi dan Koordinasi Capaian Kinerja Setdakot Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2025 secara umum menunjukkan tren yang positif dengan sebagian besar indikator mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kebijakan antar Perangkat Daerah daerah telah berjalan semakin efektif, meskipun pada beberapa indikator masih terdapat ruang untuk perbaikan.

Pada tujuan Meningkatnya dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, indikator Nilai Reformasi Birokrasi General belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini dipengaruhi oleh belum optimalnya keterlibatan dan kesiapan Perangkat Daerah penanggung jawab kegiatan utama dalam mengikuti proses penilaian oleh instansi pembina, sehingga hasil evaluasi belum maksimal. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan koordinasi dan pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait untuk memastikan partisipasi aktif dalam proses evaluasi. Ke depan, penguatan sinergi, monitoring yang lebih intensif, serta konsistensi pemenuhan indikator penilaian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan capaian Reformasi Birokrasi secara lebih komprehensif.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, indikator Skor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) berhasil mencapai target secara penuh dengan capaian 100 persen. Keberhasilan ini didukung oleh tersedianya data dukung yang lebih lengkap dan tepat waktu, meningkatnya komitmen pimpinan dan kepala OPD dalam memenuhi

kebutuhan data indikator kinerja kunci, serta intensitas koordinasi melalui rapat kerja dan desk bersama narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan OPD pengampu. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan lebih sistematis dibandingkan tahun sebelumnya.

Indikator Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti juga menunjukkan kinerja yang melampaui target, dengan capaian di atas 100 persen. Capaian ini dipengaruhi oleh semakin kuatnya komitmen Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam menindaklanjuti kerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi vertikal, pemerintah daerah lain, maupun pihak ketiga seperti perguruan tinggi dan BUMD. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kerja sama yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan turut mendorong peningkatan efektivitas tindak lanjut kerja sama. Ke depan, penyusunan SOP kerja sama dan penguatan pemetaan potensi daerah menjadi penting untuk menjaga kesinambungan dan kualitas kerja sama tersebut.

Selanjutnya, indikator Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan juga berhasil melampaui target. Keberhasilan ini didukung oleh penguatan koordinasi lintas OPD dan instansi vertikal, dukungan anggaran yang memadai, serta meningkatnya kolaborasi dengan akademisi dan masyarakat. Program-program strategis di bidang keagamaan, sosial, dan fasilitasi kelembagaan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah karena adanya forum koordinasi dan komunikasi yang semakin efektif. Meskipun demikian, masih diperlukan

penguatan monitoring dan evaluasi lapangan, pemutakhiran basis data, serta peningkatan sosialisasi program agar dampak kebijakan yang ditetapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Berbeda dengan indikator-indikator tersebut, Indeks Reformasi Hukum belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya perubahan standar variabel dan indikator penilaian dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga pemenuhan data dukung pada beberapa variabel, seperti ketersediaan perancang perundang-undangan dan tingkat kehadiran pejabat eselon II dalam kegiatan harmonisasi regulasi, belum optimal. Selain itu, pelaksanaan evaluasi terhadap produk hukum daerah juga masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain aspek pelaksanaan kegiatan, faktor kesiapan kelembagaan dan penyesuaian terhadap standar penilaian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap capaian kinerja.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan, indikator Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti mencapai target 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi koordinasi dengan perangkat daerah terkait, BUMD, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah berjalan dengan baik, sehingga perumusan dan tindak lanjut kebijakan perekonomian dapat dilakukan secara konsisten dan terarah.

Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia, meningkatnya kualitas perencanaan dan pemantauan melalui SIRUP, serta penguatan pembinaan terhadap pelaku pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan diklat, desk perencanaan, dan desk realisasi pengadaan turut berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan dan kualitas proses pengadaan. Namun demikian, ke depan masih diperlukan penguatan ketepatan waktu perencanaan dan pelaksanaan pengadaan di seluruh OPD agar capaian ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, indikator Persentase Rata-Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan juga menunjukkan kinerja yang melampaui target. Hal ini tidak terlepas dari efektivitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala, serta pemanfaatan mekanisme desk kepada OPD yang realisasinya belum sesuai target. Pengembangan dashboard khusus untuk pimpinan juga menjadi faktor pendukung dalam mempercepat pengambilan keputusan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah, indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah berhasil mencapai target. Keberhasilan ini mencerminkan semakin menguatnya komitmen pimpinan dan seluruh bagian dalam penerapan SAKIP, peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, serta konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Namun demikian, pada indikator Nilai AKIP Komponen Pelaporan masih terdapat deviasi dari target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar penyusunan perencanaan tahun berikutnya, kurangnya integrasi antara proses evaluasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja, serta penetapan target yang belum sepenuhnya berbasis data historis dan tren capaian. Oleh karena itu, telah dilakukan penyesuaian target Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya serta pemberian arahan agar setiap perubahan target disertai justifikasi yang jelas. Ke depan, optimalisasi pemanfaatan laporan kinerja, penguatan integrasi evaluasi dan penetapan target, serta kewajiban penetapan target berbasis data historis menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.

3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Subbab ini membahas keterkaitan antara capaian kinerja Sekretariat Daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Uraian ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan benar – benar berkontribusi terhadap pencapaian sasaran dan indikator kinerja, baik yang sudah mendukung pencapaian target maupun yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi dari Renstra 2021-2026 ke Renstra 2025-2029, pembahasan disusun dengan memperhatikan perbedaan sasaran dan indikator pada kedua dokumen tersebut, serta difokuskan pada kesinambungan

program dan kegiatan dalam mendukung kinerja perangkat daerah.

Tabel 24 : Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021-2026)		No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)		Program/Ke giatan	Indikator Kegiatan		Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	9	10	TARGET	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
				1	Nilai Reformasi Birokrasi General	99.98*					
					Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	100*					
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	100.06	1.1	Nilai AKIP Komponen pelaporan	97.84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) internal Sekretariat Daerah	81	78.6	97.04

					100.06	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	77	77.05	100.06
					100.06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	79.67	99.59
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	87	78.06	89.72
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87	78.17	89.85
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87	78.11	89.78

								Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	100	100.00
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor LPPD	100	1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Skor Lapangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama	100	100	100.00
									Persentase Pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah Tepat Waktu dan Tepat Guna	100	100	100.00
									Persentase Fasilitas Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Kerjasama Luar Negeri	82.81	82.81	100.00

					Indeks Reformasi Hukum	99.01	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100	100	100.00
							Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	90	90	100.00
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Nilai Inflasi Daerah	100.00	1.3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	100	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang Dilaksanakan	100	100	100.00
		Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	99.59		Indeks Tata Kelola Pengadaan	105.26	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Analisa Kebijakan Bidang Perekonomian dan SDA yang Disusun	100	100	100.00

	Presenta se rata - capaian realisasi fisik Kota Balikpap an	101. 93		Persentase Rata-Rata capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapa n	101. 93	Pelaksanaa n Administra si Pembangu nan	Persentase Analisa Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang Disusun	100	100	100. 00
						Pengelolaa n Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	78	90.92	116. 56

Keterangan:

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menuju Renstra Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

*Data capaian tahun 2024, disebabkan capaian tahun 2025 baru akan dirilis pada bulan Maret 2025

Pada tujuan Meningkatnya dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam Renstra 2025–2029, indikator Nilai Reformasi Birokrasi baik pada aspek general maupun tematik masih menggunakan capaian tahun 2024, mengingat hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 oleh instansi pembina baru akan dirilis pada bulan Maret tahun berikutnya. Dengan demikian, angka yang disajikan merupakan capaian terakhir yang tersedia secara resmi.

Berdasarkan capaian tersebut, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang tetap terjaga dan berada pada kategori baik. Hal ini mencerminkan konsistensi implementasi program reformasi birokrasi, termasuk penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan sistem akuntabilitas kinerja.

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada sasaran strategis ini, nilai AKIP komponen pelaporan masih terdapat ruang perbaikan, yang menandakan perlunya penguatan pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar penyusunan perencanaan dan perjanjian kinerja berikutnya, dan indikator Nilai SAKIP Sekretariat Daerah mencapai 100,06%, yang menunjukkan bahwa target peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja telah tercapai. Capaian tersebut terutama didukung oleh pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan, khususnya melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang juga mencapai capaian 100,06%. Sepanjang Tahun 2025, perangkat daerah

melakukan penyelarasan dokumen perencanaan, penguatan proses monitoring dan evaluasi, serta perbaikan kualitas pelaporan kinerja, sehingga berdampak langsung terhadap peningkatan nilai SAKIP.

Dukungan terhadap sasaran ini juga terlihat dari pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian indikator kepuasan layanan sebesar 99,59%, yang menunjukkan bahwa layanan administrasi keuangan telah berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah. Namun demikian, pada beberapa kegiatan layanan pendukung lainnya, seperti Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, capaian indikator IKM masih berada pada kisaran 89–90% dan belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun layanan tetap berjalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, kualitas layanan pada aspek tertentu masih perlu ditingkatkan, terutama terkait kecepatan, ketepatan proses, dan konsistensi standar pelayanan.

Sementara itu, kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, serta Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan masing-masing mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan administratif dan fasilitasi pimpinan dapat dilaksanakan secara optimal dan berkontribusi langsung terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan kegiatan kedinasan sepanjang Tahun 2025.

Secara keseluruhan, sasaran strategis ini dapat dikatakan tercapai dengan baik, meskipun masih diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan pada kualitas layanan pendukung.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pada sasaran strategis ini, indikator Skor Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mencapai 100%, sementara indikator pendukung lainnya seperti Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti dan Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan bahkan melampaui 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, khususnya melalui kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang mencapai target 100% dalam pemenuhan indikator kinerja kunci oleh perangkat daerah. Selain itu, kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah juga menunjukkan capaian 100%, yang mencerminkan bahwa fasilitasi kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri, dapat dilaksanakan sesuai rencana dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum serta Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat juga masing-masing mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa proses

fasilitasi dan harmonisasi produk hukum, serta pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat, dapat dilaksanakan secara konsisten sepanjang Tahun 2025. Secara faktual, rangkaian kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi tersebut berkontribusi langsung terhadap terjaganya kualitas kebijakan daerah dan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Pada sasaran strategis ini, indikator Nilai Inflasi Daerah tercapai 100%, indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan mencapai 105,26%, serta Persentase Rata-Rata Capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan mencapai 101,93%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengendalian pelaksanaan pembangunan, tata kelola pengadaan, serta kinerja pembangunan daerah secara umum berada pada kondisi yang baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Capaian ini didukung oleh pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan, khususnya melalui kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang masing-masing mencapai target 100%. Sepanjang Tahun 2025, kegiatan ini diwujudkan melalui penyusunan dan analisis kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, serta analisis kebijakan di bidang administrasi pembangunan, yang kemudian digunakan sebagai dasar

pengendalian dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Selain itu, pada kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, indikator IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa mencapai 116,56%, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan pengadaan dinilai sangat baik oleh pengguna layanan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan proses layanan, peningkatan transparansi, serta penguatan pendampingan kepada perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Secara keseluruhan, program dan kegiatan pada sasaran strategis ini memberikan kontribusi nyata terhadap terjaganya kualitas pembangunan daerah dan peningkatan tata kelola perekonomian serta pembangunan.

Table 25 : Dokumentasi Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumentasi
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggara n Pemerintah Daerah dan Kualitas Kebijakan	Skor Lapangan Penyelenggara n Pemerintah Daerah	 rapat kerja penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Desk OPD Pengampu penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kemendagri
	Persentase Kerja Sama Daerah yang Ditindaklanjuti		fasilitasi kerjasama
	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Ditetapkan		Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Tingkat Kota Dan Pembahasan Draf Perwali Posyandu Kota Balikpapan



Rapat koordinasi pemantauan
pelaksanaan MBG



Koordinasi dengan Kantor
Kementerian Agama Kota
Balikpapan Terkait fasilitasi Data
Santri Pondok pesantren Tahun
2025



Kegiatan rukyatul hilal



Pelepasan calon jamaah haji



Kafilah MTQ Kota Balikpapan

Indeks
Reformasi
Hukum



Evaluasi Produk Hukum



Evaluasi Produk Hukum

			 Harmonisasi produk hukum perubahan rkpd 2025  Harmonisasi hukum PAUD
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	 kegiatan high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Balikpapan Tindak lanjut penguatan bahan pokok penting menjelang hari raya idul fitri 

		Capacity Building TPID dengan tema “Penguatan Sinergi TPID dan Optimalisasi Peran BUMD untuk Mendukung Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan Secara Berkelanjutan”.  High Level Meeting TPID Kota Balikpapan dengan Intensifikasi Pengawasan Makanan Menjelang Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	 Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 serta tata cara persiapan, pemesanan, dan negosiasi pada e-katalog versi 6

		Persentase Rata-Rata capaian Realisasi Fisik Kota Balikpapan  Rapat kerja evaluasi dan implementasi perubahan apbd ta 2025 pada aplikasi siperangko
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen  

			Rapat koordinasi tindak lanjut SAKIP Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2025
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	 Rakor evaluasi kinerja sekretariat daerah

Sumber : Rakor dan evaluasi capaian kinerja sekretariat Daerah Kota Balikpapan

3.2.7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Subbab ini menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2025. Analisis difokuskan pada penilaian kesesuaian antara pemanfaatan sumber daya dengan output dan outcome yang dihasilkan, sebagai dasar untuk melihat tingkat optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Uraian dalam subbab ini mencakup tiga aspek utama, yaitu analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, analisis atas efisiensi penggunaan sarana dan prasarana, serta analisis atas efisiensi penggunaan anggaran. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang secara langsung mempengaruhi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, efisiensi pemanfaatan SDM menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2025. Analisis ini disusun untuk menilai kesesuaian antara kebutuhan, ketersediaan, komposisi, serta pemanfaatan SDM dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Table 26 : Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki Laki	Prempuan
1	SEKRETARIS DAERAH	1	
2	ASISTEN	2	1
3	STAF AHLI	2	1
4	KABAG	6	4
5	KASUBAG	1	1
6	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PNS)	16	21
7	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (PPPK)	1	6
8	PELAKSANA	64	51
9	PPPK PARUH WAKTU	7	1
10	CPNS	3	4
	JUMLAH PNS	103	90

Sumber : Peta Jabatan Pegawai Setdakot Tahun 2025

Ditinjau dari komposisi jabatan dan jenis kelamin, jumlah PNS laki-laki sebanyak 103 orang dan perempuan sebanyak 90 orang, yang tersebar pada berbagai jenjang jabatan, mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli,

pejabat struktural, jabatan fungsional, pelaksana, hingga CPNS dan PPPK. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa struktur organisasi tetap dapat berjalan secara fungsional dengan dukungan aparatur pada jabatan strategis, teknis, dan administratif sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas.

Table 27 : Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat Daerah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1	SD/SMP/SMA	97	66
2	D3	46	13
3	D4/S1	243	90
4	S2	7	24
	JUMLAH PNS	348	193

Sumber : Peta Jabatan Pegawai Setdakot Tahun 2025

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), kebutuhan aparatur pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan berjumlah 348 orang. Namun, sampai dengan Tahun 2025 jumlah aparatur yang tersedia sebanyak 193 orang, sehingga masih terdapat selisih antara kebutuhan dan kondisi riil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dilaksanakan dengan jumlah SDM yang lebih terbatas dibandingkan kebutuhan ideal organisasi, sehingga menuntut adanya pengelolaan SDM yang efisien dan optimal.

Selain itu, dari sisi kualifikasi pendidikan, SDM yang tersedia didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi D4/S1 sebanyak 90 orang, diikuti oleh S2 sebanyak 24 orang, SD/SMP/SMA sebanyak 66 orang, dan D3 sebanyak 13 orang. Sementara itu, kebutuhan ideal organisasi menunjukkan dominasi kebutuhan pada kualifikasi D4/S1, yang mencerminkan bahwa sebagian besar tugas dan fungsi

perangkat daerah memerlukan kompetensi pada jenjang pendidikan tersebut. Dengan demikian, meskipun secara kuantitas masih terdapat kekurangan SDM, secara kualitatif komposisi pendidikan aparatur telah cukup mendukung pelaksanaan tugas utama perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan SDM yang tersedia, antara lain melalui pengaturan pembagian tugas lintas bagian, kerja tim, serta penyesuaian beban kerja sesuai prioritas program dan kegiatan. Dengan pola tersebut, seluruh program dan kegiatan tetap dapat dilaksanakan tanpa penambahan jumlah pegawai, serta tetap mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan dengan memperhatikan keseimbangan beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Subbab ini disusun untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja pada Tahun 2025. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara ketersediaan, kondisi, dan tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi, guna memastikan bahwa seluruh aset digunakan secara optimal, sesuai fungsi dan peruntukannya.

Untuk mendukung analisis tersebut, disajikan data inventarisasi sarana dan prasarana yang menggambarkan jenis, jumlah unit, kondisi, serta tingkat pemanfaatan aset yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tahun pelaporan. Data ini menjadi dasar dalam menilai kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi.

Table 28 : Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	Tanah	112	Baik	√	x	
2	Gedung dan Bangunan	59	Baik	√	x	
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	71	Baik	√	x	
4	Peralatan dan Mesin	4.414	Baik	√	x	
5	Aset Tetap Lainnya	9	Baik	√	x	
6	Aset Lainnya	32	Baik	√	x	

Sumber : KIB_A Setdakot Tahun 2025

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa seluruh aset yang dimiliki, yang meliputi tanah sebanyak 112 unit, gedung dan bangunan sebanyak 59 unit, jalan, irigasi, dan jaringan sebanyak 71 unit, peralatan dan mesin sebanyak 4.414 unit, aset tetap lainnya sebanyak 9 unit, serta aset lainnya sebanyak 32 unit, berada dalam kondisi baik dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan

bahwa sarana dan prasarana dimanfaatkan secara aktif sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis operasional.

Tidak terdapat aset dalam kondisi tidak digunakan pada tahun pelaporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan efisien. Ketersediaan aset yang memadai dan pemanfaatannya yang tepat sasaran tersebut memberikan dukungan langsung terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan, serta berkontribusi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada Tahun 2025. Ke depan, pengelolaan sarana dan prasarana akan tetap diarahkan pada upaya pemeliharaan kondisi aset serta penyesuaian kebutuhan sesuai perkembangan tugas dan fungsi organisasi.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Subbab ini disusun untuk menilai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah pada Tahun 2025. Analisis dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara alokasi dan realisasi anggaran dengan output dan outcome yang dihasilkan sebagaimana tercermin dalam capaian indikator kinerja. Uraian difokuskan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, guna menunjukkan sejauh mana anggaran telah dimanfaatkan secara efisien dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas dan efisiensi

pengelolaan anggaran serta sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pengukuran efisiensi anggaran pada subbab ini mengacu pada ketentuan pengukuran efisiensi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan membandingkan capaian kinerja dan tingkat serapan anggaran pada masing-masing indikator kinerja. Efisiensi hanya diakui untuk indikator dengan capaian kinerja mencapai 100% atau lebih, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian Keluaran i (kolom 8)

PAKi : Pagu Anggaran Keluaran i (kolom 9)

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran I (kolom10)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Table 29 : Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Poin	APBD	77	77.05	100.06%	143,299,091,863	123,519,987,688	86.20	13.86	Efisien
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Skor LPPD	Poin	APBD	3.7018	3.7018	100%	16,680,259,580	10,510,913,630	63.01	36.99	Efisien
	bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	Presentase	APBD	90.2	91.18	101.09%	12,163,169,703	11,749,562,700	96.60	4.44	Efisien
		Presentase Produk Hukum yang di Fasilitasi dan di Harmonisasi	Presentase	APBD	100	100	100%	2,763,947,320	2,154,534,017	77.95	22.05	Efisien
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah	Nilai Inflasi Daerah	Presentase	APBD	2,5±1	2,71	100%	1,012,510,715	815,908,612	80.58	19.42	Efisien
	bidang Perekonomia	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	Poin	APBD	74	77.89	105.26%	2,129,115,166	1,734,931,984	81.49	22.58	Efisien

n dan Pembanguna n	Presentase rata - rata capaian realisasi fisik Kota Balikpapan	Perse n	APBD	96.5	98.36	101.9 3%	1,158,512,382	1,015,708,796	87.67	13.98	Efisi en
1 Tujuan : Meningkatny a dukungan tata kelola pemerintah n yang berkualitas	Nilai Reformasi Birokrasi General	Nilai	APBD	69.9 8	69.96*	99.97 %*	143,299,091,863	123,519,987,688	86.20	13.78	Belu m Efisi en
	Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Nilai	APBD	8.32	8.32*	100%*	143,299,091,863	123,519,987,688	86.20	13.80	Efisi en
1.1 Meningkatny a Kinerja Penyelenggar aan Pemerintah Daerah dan Rakyat Kualitas Kebijakan Daerah bidang Pemerintah n dan Kesejahteraa n Rakyat	Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahtera an Rakyat yang Ditetapkan	%	APBD	90.2	91.67	102%	18,850,867,379	17,198,864,902. 64	91.24	10.23	Efisi en
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	APBD	98.3 5	97.38	99%	2,763,947,320	2,154,534,017	77.95	21.27	Belu m Efisi en

1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti	%	APBD	100	100	100%	1,012,510,715	815,908,612	80.58	19.42	Efisien
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pelayanan Publik pada Sekretariat Daerah	Nilai AKIP Komponen Pelaporan	Nilai	APBD	9.72	9.51	97.84 %	143,299,091,863	123,519,987,688	86.20	11.90	Belum Efisien

Sumber : Realisasi Keuangan Tahun 2025

*Data capaian menggunakan data capaian Tahun 2024 dikarenakan data capaian tahun 2025 baru akan dirilis bulan maret tahun 2026

Berdasarkan tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 tercermin dari keterkaitan antara capaian kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021–2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan. Secara umum, capaian kinerja yang dapat memenuhi bahkan melampaui target dengan tingkat serapan anggaran yang relatif terkendali menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilaksanakan secara efisien.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya efisiensi penggunaan anggaran tersebut antara lain:

1. Optimalisasi sumber daya internal, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak banyak bergantung pada dukungan eksternal dan dapat menekan kebutuhan belanja tambahan.
2. Penguatan koordinasi lintas bagian dan perangkat daerah, yang membuat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan berjalan lebih efektif tanpa menambah beban anggaran.
3. Pemanfaatan mekanisme daring dan sistem yang telah tersedia, sehingga kebutuhan belanja perjalanan dinas dan kegiatan operasional dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas output.

4. Fokus pada kegiatan prioritas dan output utama, sehingga alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan langsung mendukung pencapaian target kinerja.
5. Penguatan fungsi monitoring dan evaluasi yang terintegrasi, yang membantu menjaga efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mencegah pemborosan anggaran.
6. Optimalisasi sistem dan mekanisme kerja yang sudah berjalan, sehingga peningkatan kinerja dapat dicapai tanpa memerlukan tambahan belanja yang signifikan.

Di sisi lain, terdapat indikator kinerja yang efisiensi penggunaan anggarannya belum dapat diakui, yaitu Indeks Reformasi Hukum dan Nilai AKIP Komponen Pelaporan.

Indeks Reformasi Hukum hanya mencapai 99,01% dari target 100%. Meskipun secara persentase capaian tergolong tinggi, secara prinsip akuntabilitas kinerja target yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya terpenuhi, sehingga penggunaan anggaran pada indikator ini belum dapat dikategorikan efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan sistem, pemenuhan data dukung, dan penguatan tata kelola pelaksanaan reformasi hukum.

Demikian pula, Nilai AKIP Komponen Pelaporan Tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan demikian, meskipun alokasi anggaran tersedia, pemanfaatannya belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas secara optimal.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya kedua indikator tersebut antara lain:

1. Perubahan standar, variabel, dan indikator penilaian dibandingkan tahun sebelumnya yang belum sepenuhnya diantisipasi melalui penyesuaian mekanisme kerja dan kelengkapan data dukung;
2. Pemenuhan data dukung reformasi hukum yang belum optimal, khususnya terkait variabel perancang perundang-undangan;
3. Tingkat kehadiran pimpinan perangkat daerah (Eselon II) dalam kegiatan harmonisasi regulasi yang belum konsisten;
4. Pelaksanaan evaluasi terhadap produk hukum yang masih terbatas sehingga fungsi pengendalian mutu regulasi belum berjalan maksimal;
5. Pemanfaatan laporan kinerja yang belum sepenuhnya dijadikan dasar perbaikan perencanaan dan pengambilan keputusan tahun berikutnya;
6. Belum terintegrasinya secara kuat proses evaluasi kinerja dengan penyusunan target Perjanjian Kinerja (PK);
7. Penetapan target yang belum sepenuhnya berbasis data historis dan analisis tren capaian kinerja.

Secara umum, kondisi tersebut mencerminkan bahwa tantangan utama tidak semata terletak pada kecukupan anggaran, melainkan pada penguatan tata kelola, konsistensi implementasi, serta integrasi siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2025 menunjukkan bahwa pada sebagian besar indikator kinerja, anggaran telah

dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian target kinerja. Sementara itu, pada indikator yang belum mencapai target, efisiensi belum dapat diakui dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya, agar keterkaitan antara alokasi anggaran dan capaian kinerja dapat semakin optimal.

3.3. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Uraian disusun untuk memberikan gambaran mengenai besaran anggaran yang dialokasikan, tingkat penyerapan anggaran, serta keterkaitannya dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

Table 30 : Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025

NO	SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
	<i>Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</i>			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	143,299,091,863	123,519,987,688	86.20%
1	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	222,045,430	191,054,894	86.04%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33,999,650	30,537,859	89.82%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	88,045,955	66,875,072	75.95%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	19,999,825	15,702,360	78.51%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80,000,000	77,939,603	97.42%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35,165,745,395	33,453,678,102	95.13%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34,904,996,000	33,236,578,017	95.22%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	196,841,370	163,319,490	82.97%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17,181,295	14,528,700	84.56%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	46,726,730	39,251,895	84.00%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	448,360,000	345,609,500	77.08%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	25,000,000	23809500	0.00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	423,360,000	321,800,000	76.01%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	50,470,268,018	45,869,184,692	90.88%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	750,000,000	659,862,000	87.98%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3,662,834,070	2,686,863,408	73.35%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2,723,600,000	1,964,180,940	72.12%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16,646,540,000	14,738,655,600	88.54%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	677,797,325	473,569,864	69.87%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	450,000,000	267,285,724	59.40%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,423,246,623	18,057,855,232	98.02%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,136,250,000	7,020,911,924	98.38%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4,066,981,729	2,912,322,729	71.61%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	610,575,546	371,151,000	60.79%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	750,000,000	723,041,790	96.41%
	Pengadaan Mebel	500,000,000	287,283,750	57.46%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	924,257,183	797,733,252	86.31%

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,282,149,000	733,112,937	57.18%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31,211,516,010	22,611,457,379	72.45%
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	3,400,000,000	2,638,258,947	77.60%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27,811,516,010	19,973,198,432	71.82%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,553,997,066	10,670,789,203	78.73%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,506,500,000	1,085,581,881	72.06%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,500,349,800	3,053,864,006	67.86%
	Pemeliharaan Mebel	160,000,000	29,403,701	18.38%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,368,672,000	1,075,414,600	78.57%
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25,000,000	24,420,000	97.68%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,122,766,266	4,998,007,490	97.56%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	870,709,000	404,097,526	46.41%
8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,620,084,003	2,510,516,953	95.82%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	250,000,000	162,132,953	64.85%
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	300,000,000	278,300,000	92.77%
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2,070,084,003	2,070,084,000	100.00%
9	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1,700,000,000	1,467,112,220	86.30%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	800,000,000	666,786,000	83.35%
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	750,000,000	665,802,220	88.77%

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	150,000,000	134,524,000	89.68%
10	Penataan Organisasi	841,102,822	790,210,694	93.95%
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	215,549,917	205,500,704	95.34%
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	178,845,805	170,918,537	95.57%
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	87,677,881	72,018,200	82.14%
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	200,379,625	187,046,800	93.35%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	158,649,594	154,726,453	97.53%
11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2,998,991,390	2,698,051,322	89.97%
	Fasilitasi Keprotokolan	1,028,400,000	944,210,620	91.81%
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,052,886,015	883,279,888	83.89%
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	917,705,375	870,560,814	94.86%
	<i>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</i>			
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	50,458,243,982	41,613,875,250	87.47%
12	Administrasi Tata Pemerintahan	16,680,259,580	10,510,913,630	83.83%
	Penataan Administrasi Pemerintahan	12,756,620,400	7,373,002,639	57.80%
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1,465,434,100	1,300,172,832	88.72%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2,458,205,080	1,837,738,159	74.76%
13	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	18,850,867,379	17,198,864,903	86.23%
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	16,365,351,854	15,032,126,379	91.85%
	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	2,303,883,225	1,999,786,724	86.80%
	Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	181,632,300	166,951,800	91.92%
14	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2,763,947,320	2,154,534,017	84.21%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	568,300,000	484,257,709	85.21%
	Fasilitasi Bantuan Hukum	904,499,420	504,942,572	55.83%

	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	1,291,147,900	1,165,333,736	90.26%
15	Fasilitasi Kerjasama Daerah	12,163,169,703	11,749,562,700	96.30%
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	11,937,499,900	11,547,204,263	96.73%
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	225,669,803	202,358,437	89.67%
	<i>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan</i>			
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4,300,138,263	3,566,549,392	81.71%
16	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1,012,510,715	815,908,612	81.55%
	Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	417,000,000	264,434,477	63.41%
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	407,000,000	372,685,512	91.57%
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	188,510,715	178,788,623	94.84%
17	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1,158,512,382	1,015,708,796	74.88%
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	271,271,945	230,042,629	84.80%
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	195,969,112	155,880,119	79.54%
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	691,271,326	629,786,048	91.11%
18	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2,129,115,166	1,734,931,984	90.01%
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	340,369,700	291,661,385	85.69%
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	717,452,311	612,436,830	85.36%
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1,071,293,155	830,833,769	77.55%
		198,057,474,108	168,700,412,329.99	

Sumber : SIPD Kemendagri Tahun 2025

Berdasarkan data realisasi anggaran Tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp198.057.474.108 dengan realisasi sebesar Rp168.700.412.329,99 atau mencapai 85,18%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dapat didukung oleh pengelolaan anggaran yang cukup optimal,

meskipun masih terdapat selisih antara rencana dan realisasi anggaran yang dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan kegiatan serta upaya efisiensi belanja.

Ditinjau per kelompok sasaran, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki alokasi anggaran sebesar Rp143.299.091.863 dengan realisasi Rp123.519.987.688 atau sebesar 86,20%. Realisasi ini terutama didukung oleh kegiatan pada administrasi keuangan, administrasi umum, penataan organisasi, serta pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang secara umum menunjukkan tingkat serapan anggaran yang tinggi dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.

Selanjutnya, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dialokasikan sebesar Rp50.458.243.982 dengan realisasi Rp41.613.875.250 atau sebesar 87,47%. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan pada bidang administrasi tata pemerintahan, kebijakan kesejahteraan rakyat, fasilitasi dan koordinasi hukum, serta fasilitasi kerja sama daerah, yang secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki alokasi anggaran sebesar Rp4.300.138.263 dengan realisasi Rp3.566.549.392 atau sebesar 81,71%. Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan perekonomian, administrasi pembangunan, serta pengelolaan pengadaan barang dan jasa, dengan penyerapan anggaran yang

mencerminkan upaya menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Tahun 2025 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah melalui pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas. Perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi yang dicapai pada beberapa kegiatan umumnya dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan riil, efisiensi belanja, serta dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan. Meskipun demikian, pengelolaan anggaran tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, sehingga tetap memberikan dukungan yang memadai terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta dokumen perencanaan strategis yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Sebagian besar indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa indikator menunjukkan capaian melampaui target, sehingga mencerminkan konsistensi implementasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja.

Capaian pada aspek akuntabilitas menunjukkan hasil yang baik dan stabil. Pada aspek tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan administrasi pemerintahan daerah, indikator-indikator utama juga menunjukkan capaian yang terkendali dan mendukung pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Realisasi anggaran sebesar 85,18% dari total pagu anggaran mengindikasikan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilaksanakan secara relatif

optimal dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target kinerja, yaitu Indeks Reformasi Hukum dan Nilai AKIP Komponen Pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan anggaran dan pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan, masih diperlukan penguatan pada aspek kualitas implementasi, integrasi sistem manajemen kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

Beberapa faktor yang memengaruhi belum optimalnya capaian tersebut antara lain perubahan standar dan variabel penilaian, belum optimalnya pemanfaatan laporan kinerja dalam siklus perencanaan, terbatasnya integrasi antara evaluasi dan penyusunan target kinerja, serta perlunya penguatan konsistensi pelaksanaan evaluasi terhadap produk hukum dan kebijakan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 telah menunjukkan komitmen terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan. Meskipun demikian, peningkatan kualitas manajemen kinerja yang berorientasi hasil (result oriented) dan berbasis data (evidence based) tetap menjadi agenda prioritas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bagian dari komitmen peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas penyelenggaraan

pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan integrasi siklus manajemen kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengukuran, hingga evaluasi dan pelaporan secara sistematis dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penetapan target kinerja melalui pemanfaatan data historis, analisis tren capaian, serta identifikasi risiko strategis;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja sebagai instrumen pengendalian dan dasar perbaikan kebijakan serta program pada tahun berikutnya;
4. Memperkuat pelaksanaan Reformasi Hukum melalui peningkatan kualitas harmonisasi regulasi, evaluasi produk hukum, serta konsistensi pemenuhan indikator penilaian;
5. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja melalui penguatan reviu internal, validasi data dukung, dan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan SAKIP;
6. Mengintensifkan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keselarasan antara target, realisasi, dan pemanfaatan anggaran.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut, diharapkan kinerja Sekretariat Daerah Kota Balikpapan pada tahun-tahun mendatang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebagai penutup, LKjIP Tahun 2025 ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban

administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajerial yang strategis dalam mendorong perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), penguatan budaya kinerja, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang prima.

Balikpapan, 27 Februari 2026
P. Sekretaris Daerah
Kota Balikpapan

Agus Budi Prasetyo S.I.P., M.T.